

**REAKSI UMAT ISLAM  
TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK SUHARTO  
( 1966-1998 )**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab

Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Agama

Oleh

**NANANG SUPRIYANTO**  
NIM .96121863

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM FAKULTAS ADAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001**

## ABSTRAK

Berbicara mengenai umat Islam di Indonesia kaitannya dengan hubungan antar pemerintah dalam hal ini Soeharto sebagai pemegang kendali rezim dengan umat Islam cukup menarik. Di masa awal Soeharto berkuasa, Islam dipandang sebagai penghambat modernisasi, kemajuan, serta pertumbuhan ekonomi, sehingga timbul kesan Islam identik dengan kebodohan dan keterbelakangan, serta radikal. Maka Soeharto berusaha ematikan peran politik umat Islam, sehingga umat Islam dihadapkan pada kenyataan pahit karena harus minoritas dalam politik serta distribusi kekuasaan.

Obyek dari kajian ini adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah atau historis dimana proses mengkaji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman masa lampau, kemudian merekonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi. Kajian ini menggunakan pendekatan politik yaitu melihat segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau memertahankan suatu macambentuk susunan masyarakat.

Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa perilaku politik Soeharto dalam ini kaitannya dengan hubungan antara Soeharto dengan umat Islam selama Soeharto berkuasa dapat dipolarisasikan ke dalam 3 masa : 1) hubungan Antagonistik (1966-1981), pada masa ini setelah Soeharto memantapkan kekuasaannya segera melakukan control yang lebih ketat terhadap kekuatan politik Islam. 2) hubungan Resiprokat kritis, pada ini pemerintah melakukan political test dengan menyodorkan azas tunggal, walaupun menimbulkan pro dan kontra namun akhirnya umat Islam menyadari bahwa pemerintah tidak akan menjauhkan umat Islam dengan agamanya. 3) hubungan Akomodatif (1985-1990) pada masa ini kebijakan pemerintah banyak menguntungkan umat Islam, diantaranya RUU Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, kasus monitor penghapusan larangan jilbab, berdirinya BMI dan ICMI.



DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS ADAB**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telpun (0274) 513949

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**Reaksi Umat Islam Terhadap Kebijakan Politik Soeharto (1966-1998)**

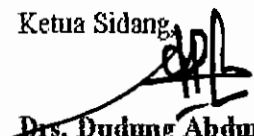
Diajukan oleh :

**N a m a** : Nanang Supriyanto  
**N I M** : 96121863  
**Program** : Sarjana Strata 1  
**Jurusan** : SKI

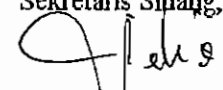
telah dimunaqasyahkan pada hari : Jum'at tanggal : 7-12-2001 dengan nilai : B- dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Agama.

**Panitia Ujian Munaqasyah,**

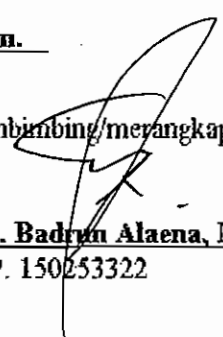
Ketua Sidang,

  
**Drs. Dudung Abdurahman, M.Hum.**  
NIP. 150240122

Sekretaris Sidang,

  
**Muhammad Wildan, S.Ag., MA.**  
NIP. 150270411

Pembimbing/meyangkap Penguji,

  
**Drs. Badrun Alaena, M.Si.**  
NIP. 150253322

Penguji I,

  
**Drs. H. Mundzirin Yusuf**  
NIP. 150177004

Penguji II,

  
**Drs. Sunardi, M.A.**  
NIP. 150275423

Yogyakarta, 26-12-2001  
  
  
**Prof. Dr. H. Machasin, M.A.**  
NIP. 150201334

## MOTTO

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya :

*"Katakanlah: Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Q. S. Ali 'Imran : 26) \**

---

\* Yayasan Penyelenggara Perterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd, 1411 H / 1990 M), hlm. 79.

## PERSEMBAHAN

*Dengan penuh rasa rendah hati tanpa mengurangi rasa hormat kami, karya yang sederhana ini kupersembahkan :*

- *untuk yang paling kuhormati dan kutaati, yang telah memberikan doa dan bimbingan demi terwujudnya keinginan dalam bayangan mimpi kecilku, Bapak dan Ibu di Klaten.*
- *untuk adikku, Didik Daryanto yang telah membentuk kepribadianku sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab dan bersyukur.*
- *untuk istri tercinta yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan study.*
- *Untuk almamater IAIN Sunan Kalijaga.*

4. Segenap petugas perpustakaan pusat IAIN, perpustakaan Fakultas Adab IAIN, perpustakaan Masjid Gede, perpustakaan daerah dan buku-buku teman-teman sehingga membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan lancar.
5. Bapak, Ibu, Adikku, Saudaraku di Delanggu, Jimbung, Parakan, dan Paman, Bibi di Jakarta dan daerah lain yang telah memberikan bantuan moril maupun material sehingga penulis mampu menyelesaikan study.
6. Teman-temanku di SKI angkatan '96 khususnya Nur Zidi ( tempat chatting dan curhat ), Mbak Saumi yang telah memberi arti keprihatinan, Fauzan sebagai teman seperjuangan agama ( yang klop) Juli, Anis, Isti, Dede, trus buat ISAM 3 yang telah memberikan inspirasi kreativitas dalam hidup. khususnya penggede ISAM 3 : Mashe, Mbake, Ruzman, Nug 2, Mbardi, Ishni, Bashushuki, Ayhis UNS (Universitas Nyang Solo), 3 S, Maridjah, Khomy, Zyuli semoga makin kompak wae e, e lupa juga buat Ish@k I. M (Insinyur Mesin) yang telah membantu mengetikkan skripsi ini sampai capek dan umumnya adik-adik ISAM 3 (mudah-mudahan nurut ama ustadz/ustadzahmu ) and yang terakhir buat semuanya yang kelupaan belum tercantum diatas serta salam buat sobat-sobatku yang pernah kukenal (lupa atau tidak). salam manis Nanang.

Yogyakarta, 25 Nopember 2001

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian dan Pendekatan .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II GAMBARAN UMUM ORDE BARU	
A. Latar Belakang Berdirinya orde Baru .....	12
B. Kondisi Sosil Politik Umat Islam Menjelang lahirnya Orde Baru .....	19
BAB III KEBIJAKAN POLITIK SUHARTO TERHADAP UMAT ISLAM	
A. Hubungan Yang Bersifat Antagonistik (1966-1981) .....	25
1. Gagalnya pembentukan PDII .....	25

2. Gagalnya Rehabilitasi Masyumi dan berdirinya Parmusi .....	27
3. Aliran Kepercayaan dalam SU MPR 1973 .....	29
4. Rancangan Undang-undang Perkawinan.....	30
5. Masalah Perjudian.....	32
B. Hubungan Yang Bersifat Resiprok - Kritis ( 1982-1985 ) .....	33
C. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif ( 1985-1998 ) .....	37
1. RUU Pendidikan Nasional.....	38
2. RUU peradilan Agama .....	39
3. Kasus Monitor .....	40
4. Bantuan Untuk Kegiatan Dakwah .....	42
5. BMI.....	43
6. ICMI.....	44
7. Penghapusan SDSB.....	46
8. Pencabutan Larangan Jilbab.....	47

#### BAB IV REAKSI UMAT ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK SUHARTO

A. Reaksi Orsospol dan Ormas Islam Terhadap Penerapan Azas Tunggal	
Pancasila .....	49
1. Partai Persatuan Pembangunan .....	50
2. NU.....	51
3. Muhammadiyah .....	52
4. HMI .....	53



5. PII .....	54
B. Reorientasi Strategi Politik Elit Islam .....	55
C. Dukungan Terhadap Kepeimpinan Suharto .....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan Bangsa Indonesia dapat dipolarisasikan kedalam beberapa orde terutama setelah runtuhnya kolonialisme di negeri ini. Diawali dengan orde lama (Orla) di bawah kendali Sukarno yang lebih mengedepankan ideologi politik ternyata tidak bisa bertahan lama. Perjuangan demokrasi liberal (konstitusional) pun gagal, hal ini dikarenakan ketidak mapanan (kematangan) politik sehingga pada tanggal 30 September 1965 struktur tersebut menjadi hancur akibat adanya kub yang dilancarkan PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Akibat kub yang dilancarkan PKI itu menimbulkan ancaman bagi kekuatan politik yang lain seperti angkatan darat yang mendominasi sebagai kekuatan politik, ekonomi dan administrasi di Indonesia kemudian NU yang ingin menjaga eksistensi Islam tradisionalnya.

Dengan alasan dan legitimasi atas peristiwa G. 30 S/PKI inilah Sukarno dijatuhkan berbagai kekuatan, baik elemen mahasiswa dengan tuntutan *Trituranya*, Angkatan Darat yang merasa gerah dengan PKI, maupun Islam sendiri yang berseberangan dengan PKI. Latar belakang berdirinya Orde Baru sepenuhnya didukung oleh Angkatan Darat (militer, teknokrat sekuler atau kristen dan pengusaha non pribumi).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Al Chaedar, *Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)*, (Jakarta: Darul falah, Penerbit Buku Islam, 1999), hlm. 27-28.

kemudian disahkannya RUU Peradilan agama dan RUU sistem pendidikan nasional, dicabutnya larangan mengenakan jilbab bagi siswi sekolah umum dan dicabutnya SDSB. Cara Suharto dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan sebagian umat Islam juga mengalami perubahan.

Penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mendirikan negara Islam Indonesia (NII) oleh aparat lebih lunak dibanding dengan masa sebelumnya. meskipun kasus-kasus serupa sering muncul, dalam menanganinya aparat menggunakan pendekatan persuasif, mereka menilai orang-orang yang terlibat dalam aksi itu sebagai orang-orang yang memerlukan pembinaan. Misalnya di Pandeglang, mereka ditangkap dan akhirnya dilepaskan dan dibina oleh masyarakat. Berbeda dengan penanganan kasus Tanjung Priok, Lampung, Komando Jihad, Aceh dan sebagainya yang sarat dengan kekerasan aparat dan diyakini umat Islam sebagai provokasi terhadap umat Islam.<sup>5</sup>

Meskipun telah terjalin hubungan yang harmonis antara negara dan Islam, pemerintahan Suharto masih menggunakan dua strategi:

1. Dia mencoba mengkooptasi organisasi-organisasi Islam, para pemuka muslim dibujuk untuk bergabung dengan partai yang berkuasa, dalam hal ini Golkar dipandang sebagai wahana yang efektif bagi kepentingan kaum muslim.
2. Mendiskreditkan para aktivis muslim dengan cara menghubung-hubungkan mereka dengan ekstremisme dan terorisme dan kemudian mengancam dan menganiaya mereka. sebelum pemilihan presiden Suharto yang keempat kali di

---

<sup>5</sup> Adian Husaini, *Suharto, 1998*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43-45.

bulan Maret 1983, ratusan muslim dibunuh oleh pasukan berani mati di Jawa Timur (Tapol 1987:16).<sup>6</sup>

Strategi di atas merupakan hal yang biasa untuk sebuah perubahan agar tidak terkesan revolusioner, belum lagi bila dikaitkan dengan aparat yang menangani kejadian di atas. Akan tetapi kejadian diatas secara umum menunjukkan adanya strategi akomodasi Suharto terhadap tuntutan umat Islam dalam porsi yang disesuaikan dengan jumlah mayoritas dinegeri ini.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berbicara mengenai umat Islam di Indonesia kaitanya hubungan antara pemerintah dalam hal ini Suharto sebagai pemegang kendali rezim dengan umat Islam cukup menarik. Dimasa awal Suharto berkuasa Islam dipandang sebagai penghambat modernisasi, kemajuan, serta pertumbuhan ekonomi sehingga timbul kesan Islam identik dengan kebodohan dan keterbelakangan, serta radikal. Maka Suharto berusaha mematikan peran politik umat Islam, sehingga umat Islam dihadapkan pada kenyataan pahit karena harus minoritas dalam politik serta distribusi kekuasaan. Berbagai tindakan dijalankan Suharto untuk melumpuhkan kekuatan Islam diantaranya intimidasi, manipulasi serta menyudutkan umat Islam.

Memasuki dasawarsa 80-an dan 90-an terjadi perubahan drastis dalam sistem pemerintahan, dalam hal ini hubungan antara pemerintah dan umat Islam yang kini berbalik arah menjadi kelonggaran dan akomodasi peran dan keinginan umat Islam.

---

<sup>6</sup> Anders Uhlin, "*Oposisi Berserak*" (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 70-71.

Banyak indikator yang bersifat struktural, infra struktural maupun kultural yang dijadikan dasar penilaian, termasuk dalam hal ini disahkannya Undang-Undang Pendidikan Agama (UUPA), disusunnya komplikasi Jilbab keluarnya SKB tentang Jilbab, SKB tentang Bazis, berdirinya BMI dan pembentukan ICMI.

Setidaknya ada dua makna penting yang pantas untuk dicatat. Pertama: pada tatanan simbolis; bahwa hal ini tidak menjadi persoalan berat, paling tidak gap ideologis yang dulu melebar telah terciutkan. Kedua: menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku politik Suharto terhadap komunitas Islam, sehingga kepentingan umat Islam mulai terakomodasi.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas penulis memilih judul ini untuk menjelaskan perilaku politik Suharto khususnya tentang umat Islam dalam kerangka tahun 1966 sampai tahun sampai 1998.

### C. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini ialah permasalahan tentang kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah berkait dengan keberadaan umat Islam di bawah kontrol pemerintahan Suharto mulai tahun 1966-1998.

Kajian ini lebih memfokuskan pada pengungkapan permasalahan tersebut, maka perlu disusun rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Zuli Qodir dan Lalu M. Iqbal Sangell. *ICMI. Negara dan Demokratisasi*, (Yogyakarta : Kelompok Study Lingkaran. 1995), hlm. ix-x.

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru?
2. Bagaimana kondisi sosial politik umat Islam menjelang lahirnya Orde Baru?
3. Bagaimana perilaku politik Soeharto yang terkait dengan umat Islam dari tahun 1966-1998?
4. Bagaimana latar belakang perubahan orientasi politik Suharto?
5. Bagaimana reaksi umat Islam menghadapi politik Suharto?

#### D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui lahirnya Orde Baru.
2. Untuk mengetahui kondisi sosial politik umat Islam menjelang lahirnya Orde Baru.
3. Untuk mengetahui perilaku politik Soeharto dalam hal ini kaitannya dengan umat Islam serta perubahan orientasi politik.
4. Untuk mengetahui respon umat Islam terhadap politik Soeharto.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini:

1. Untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya.
2. Untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk karya ilmiah bagi disiplin ilmu sejarah terutama sejarah politik umat Islam.
3. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan sumbangan pemikiran tentang perilaku politik Suharto.
4. Sebagai perangsang bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang serupa.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

Perjalanan umat Islam di Indonesia terutama pada masa Orde Baru sangat menarik, hal ini dibuktikan dengan adanya literatur atau tulisan dari pengamat politik dan pengamat perjalanan umat Islam di Indonesia baik yang senior maupun yang yunior.

Akan tetapi kajian-kajian yang telah ada banyak menulis Suharto dan Orde Baru secara umum. Ada beberapa kajian yang berhasil ditemukan peneliti yang agak mirip dengan penelitian ini.

1. Drs. Abdul Aziz Thaba, MA, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta, Gema Insani Press 1990). Dalam kajian tersebut dipaparkan perjalanan umat Islam pada Orde Baru serta menyinggung masalah politik umat Islam pada masa klasik sehingga dari pengamatan peneliti dalam kajian tersebut selalu luas.
2. Adian Husaini, *Suharto, 1998* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Dalam kajian tersebut dititikberatkan pada akomodasi politik Suharto terhadap umat Islam. Dalam hal ini peneliti memahami bahwa kajian tersebut membahas hubungan Suharto dengan Umat Islam pada kurun 80-an 90-an. Kemudian tinjauan di Fakultas Adab terutama pada skripsi teman-teman yang telah ada peneliti sejauh ini belum menemukan skripsi yang sama dalam kajian ini.

Sedang kajian ini lebih menitikberatkan pada penelaahan kebijakan yang dihasilkan Suharto selaku pemegang kendali Orde Baru.

## F. METODE PENELITIAN

Obyek pembahasan dalam skripsi ini adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan adalah metode historis yaitu proses mengkaji dan menganalisa secara kritis terhadap rekaman masa lampau, kemudian merekonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.<sup>8</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah:

### 1. Pengumpulan data

Penulis berusaha mengumpulkan data sejarah yang relevan dengan obyek pembahasan melalui kajian kepustakaan seperti kajian buku-buku skripsi, majalah, koran, artikel dan karya ilmiah lainnya.

### 2. Kritik sumber

Tahap ini dilakukan untuk menguji kebenaran data sejarah yang diperoleh secara kritis. Melalui kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan guna menguji keautentikan data sejarah sedang kritik intern digunakan untuk membuktikan keakuratan sebuah data autentik dan untuk mengetahui relevansi suatu data sejarah dengan obyek kajian.

### 3. Penafsiran interpretasi.

Setelah data yang autentik dan relevan ditemukan dan telah teruji kebenarannya, penulis berusaha memberikan penjelasan dan merangkaikan data menjadi sebuah karya ilmiah yang mudah dipahami.

### 4. Penulisan (Historiografi)

---

<sup>8</sup> Nugroho Noto Susanto (Terj), *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1975) hlm. 32.



Hasil dari interpretasi disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan mudah dipahami sehingga menjadi sebuah karya ilmiah yang berarti. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan politik. Yaitu melihat segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.<sup>9</sup>

#### G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penyajian penelitian dalam bentuk skripsi ini mempunyai tiga bagian yaitu pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan.

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai penelitian ini secara umum sebagai pengantar kearah inti pembahasan skripsi.

Bagian kedua merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari beberapa bab. Bab kedua membahas tentang profil Orde Baru mencakup di dalamnya tinjauan sosio politik umat Islam masa tersebut. Di sini akan dibahas tentang latar belakang berdirinya Orde Baru serta tinjauan sosio politik umat Islam.

Dalam bab ketiga dipaparkan kebijakan politik Suharto terhadap umat Islam, diantaranya marjinalisasi peran politik umat Islam, hubungan yang bersifat Resiprokat

---

<sup>9</sup> Deliar Noer, *Pengantar Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 6.

kritis yang menunjukkan perubahan perilaku politik Soeharto, serta kebijakan politik akomodatif terhadap aspirasi umat Islam bab ini sebagai tesis terhadap politik Soeharto .

Bab empat sebagai anti tesis terhadap kebijakan politik Suharto . Pad bab ini akan dipaparkan mengenai respon umat Islam terhadap politik Suharto . Diantaranya akan dibahas mengenai reaksi orsospol dan ormas Islam terhadap azas tunggal Pancasila, Reorientasi strategi politik umat Islam, dan dukungan terhadap kepemimpinan Suharto, sebagai wujud dari perubahan perilaku Suharto yang lebih akomodatif terhadap keinginan dan aspirasi umat Islam .

Bagian terakhir merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Penyimpulan dimaksudkan untuk menjelaskan hasil penelitian secara singkat, jelas dan padat. Dan dengan bertitik tolak pada kesimpulan diberikan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM ORDE BARU**

#### **A. Latar Belakang Berdirinya Orde Baru**

Bangsa Indonesia yang akhirnya merdeka, paling tidak dalam hukum internasional kini menghadapi tantangan yang cukup berat untuk menatap masa depan. Hal ini disebabkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta tradisi otoriter, sehingga tergantung pada kearifan pemimpin Bangsa Indonesia. Pada tahun 1950 oleh para kaum nasionalis perkotaan dan agamawan yang terkemuka menetapkan percobaan sebuah demokrasi. Akan tetapi sampai akhir tahun 1947 percobaan tersebut gagal. Hal ini dikarenakan dasar untuk membangun sebuah demokrasi perwakilan hampir tidak ditemukan, sehingga korupsi tersebar luas, kesatuan wilayah terancam, keadilan sosial belum tercapai, masalah ekonomi masih menghimpit, dan banyak harapan yang ditimbulkan oleh revolusi menjadi gagal.

Kebanyakan rakyat masih buta huruf dan terbiasa dengan kehidupan otoriter, sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban para elit politik apalagi ditopang dengan luasnya wilayah RI.

Demikian halnya dengan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Kerusakan setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangat besar, perkebunan-perkebunan dan instalasi industri di seluruh negeri rusak berat. Terlebih dengan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi daripada produksi pada tahun 1950, akan tetapi sejumlah beras impor masih diperlukan<sup>1</sup>.

Dalam percobaan demokrasi tersebut, meskipun berhasil membentuk kabinet atas dasar koalisi partai besar, akan tetapi kabinet tersebut tidak dapat bertahan lama.

Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir mengajukan rancangan undang-undang pemilihan yang bersifat tidak langsung, akan tetapi kabinet ini mengundurkan diri sebelum rancangan tersebut selesai. Kabinet ini kemudian diganti kabinet Soekiman-Soewirjo, kabinet ini tidak mengajukan rancangan undang-undang pemilihan umum, tetapi hanya meneruskan rancangan pada kabinet Natsir .

Meskipun kabinet Soekiman-Soewirjo berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di daerah sangir dan talaud pada bulan Mei, di Minahasa bulan Juni, Yogyakarta bulan Agustus dan makasar bulan Februari 1951, akan tetapi kabinet ini jatuh sebelum menyelesaikan undang-undang pemilihan umum.

Kabinet Wilopo-Prawoto muncul menggantikan kabinet Sukiman-Suwirjo akan tetapi kabinet didesak untuk melaksanakan pemilihan umum. Maka perdana Menteri Wilopo menugaskan Menteri Dalam Negeri Mr. Muhamad Roem dan Menteri Kehakiman Mr. Lukman Wiradinta untuk merancang Undang-Undang pemilihan umum. Meskipun segala persiapan untuk melaksanakan pemilihan umum telah dilakukan tetapi kabinet Wilopo keburu jatuh sebelum pemilihan umum.

---

<sup>1</sup> M.c Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Gajah Mada University press, 1991), hlm. 355 – 356

Kabinet Wilopo -- Suwirjo digantikan kabinet Ali Sastroamijoyo-Wangsanegara, pemilihan umum berdasarkan UU No. 7/1953 tetap belum terlaksana. Baru pada tahun 1955 pemilihan umum dapat dilaksanakan di bawah kabinet Burhanudin Harahap. Kabinet Ali-Roem-Idham terbentuk sesudah pemilihan umum 1956 yang didukung oleh tiga partai besar (PNI, Masyumi, NU) dan diperkuat Partai Katolik dan Parkindo. Kematangan politik yang diharapkan sesudah pemilihan umum tidak kunjung tiba yang diakibatkan oleh oposisi PKI dengan memobilisasi buruh serta campur tangan Presiden Soekarno dalam urusan kabinet.<sup>2</sup>

Menurut pengamatan Soekarno demokrasi liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang berupa masyarakat adil dan makmur. Masing-masing golongan berebut kekuasaan untuk kepentingan sendiri dengan mengorbankan yang lain. Maka Soekarno, menggagas sebuah negara Indonesia yang kuat dengan satu buat semua, semua buat satu artinya bersatu dalam negara kesatuan yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, dan masyarakat adil dan makmur yang memberikan kebahagiaan bagi semua warga negara. Pada masa demokrasi liberal rakyat ditunggangi pemimpin atas nama demokrasi dengan kata lain demokrasi liberal dan UUDS 1950 dipandang sebagai penyimpangan dari cita-cita revolusi Indonesia. Karena itu harus kembali pada jalan aslinya dengan UUD 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 123 - 127.

<sup>3</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996) hlm 182 -183

Gagasan Soekarno tersebut dalam rangka melaksanakan *Demokrasi Terpimpin*, karena anggapan bahwa kabinet berkaki empat lebih kuat daripada kabinet berkaki Tiga, maka Soekarno memasukkan PKI kedalam kabinet Ali-Roem-Idham. Soekarno menghendaki dibentuknya kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Rotong dengan meniadakan oposisi.

Semua partai dan golongan yang memiliki 10 sampai 12 kursi di parlemen harus dimasukkan, maka tidak diragukan lagi Soekarno berusaha memasukkan PKI dalam kabinet, meskipun sebagian besar rakyat menolak masuknya PKI dalam kabinet. Selain itu, Soekarno juga membentuk Dewan Nasional dari wakil buruh, petani, intelektual, pendeta, ulama, wanita angkatan '45, pemuda daerah dan militer. Tugas dewan ini menasehati kabinet. Gagasan Islam sebagai dasar negara yang diajukan partai politik, tidak pernah berhasil menjadi dasar ideologi. Justru muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD '45. berdasarkan UUD '45 kedudukan DPR lebih kuat sehingga senantiasa dapat mengawasi Presiden. Akan tetapi presiden membubarkan DPR akibat menolak RAPBN 1959.<sup>4</sup>

Kekacauan dan kelabilan politik ini masih berlanjut mencapai klimaknya dengan ditandai adanya gerakan 30 September (Gestapo). PKI sebagai dalang utama mencoba merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Hal ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal di Lubang Buaya. Dalam mewujudkan keinginannya, PKI juga memfitnah adanya Dewan Jenderal yaitu perebutan

---

<sup>4</sup> Anwar Harjono, *Op.Cit.*, hlm. 127-129

kekuasaan lewat kudeta atas Presiden Soekarno oleh para Jenderal Angkatan Darat. Selain itu, PKI membuat strategi ganda. Contoh, *United from Below* dan *United from Above*.

Yang pertama, menjalankan proses komunikasi kebawah lewat organisasi, mahasiswa, buruh, petani, dan nelayan. Yang kedua, mengambil inisiatif dari atas sesuai dengan kemauan PKI melalui front nasional. PKI dalam mengkampanyekan Nasakom selalu didepan, sehingga terlihat dominan dalam percaturan politik. Selain itu, PKI juga mendeskreditkan Masyumi, PSI sebagai antek-antek *Nicolin*. Semua perhitungan PKI ternyata tidak tepat. Kudeta yang dilancarkan PKI menjadi gagal, karena selain Masyumi dan agamawan juga ada kekuatan yang besar yang bersebrangan terhadap manuver PKI, yaitu ABRI khususnya Angkatan Darat.<sup>5</sup>

Sejak awal 1966 mulai ada yang melakukan koreksi total terhadap penyimpangan – penyimpangan yang terjadi sebelumnya .hal ini tentunya ditandai dengan keluarnya surat perintah 11 maret 1966 yang merupakan awal berdirinya Orde Baru. Pelantikan Suharto menjadi presiden dalam sidang MPRS bulan maret 1968 menandai surutnya dua kekuatan yaitu Soekarno dan PKI .Praktis ABRI menjadi kekuatan tunggal yang dominan, sedangkan parpol belum bisa berkembang setelah dilumpuhkan oleh rezim orde lama. Dalam keadaan demikian ABRI mempunyai nilai

---

<sup>5</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam antara cita dan fakta*, (Bandung : Mizan (anggota IKAPI), 1987), hlm. 144-146.

*surplus of power* untuk berbuat apa saja namun demikian ABRI tidak tergoda untuk membentuk pemerintahan junta militer.<sup>6</sup>

Di bawah Demokrasi Pancasila Orde Baru berusaha membangun bangsa dan negara dengan cara yang lebih nasional.<sup>7</sup>

Dimana pada masa demokrasi dipimpin “Batas Kedaulatan” itu tidak kenal oleh Ir. Soekarno sehingga merusak sendi-sendi pemerintahan negara yang telah diatur dalam UUD 45, dimana Soekarno membubarkan konstituante, membubarkan DPR, membubarkan partai-partai politik.<sup>8</sup>

Persoalan yang menghadang rezim baru adalah warisan krisis dari rezim sebelumnya. Ada dua macam krisis : di bidang ekonomi terjadi kemerosotan dan stagnasi. pada tahun 1966. Bahkan laju inflasi mencapai 650 %. Sementara itu, di bidang politik terjadi kelabilan politik karena pertentangan antar kelompok politik dalam masyarakat.

Untuk mengatasi dua krisis ini pemerintah mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar, sedang dalam bidang politik diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi. Format politik ini berbeda dengan dua format politik

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan negara dalam politik orde baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 185-186.

<sup>7</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan politik. (Teori belah bambu masa demokrasi dipimpin 1959-1965)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1990), hlm. 14.

<sup>8</sup> Menurut Abdul Kahar Mudzakar, “*Bahwa pangkal kekacauan pemerintahan pada masa demokrasi dipimpin adalah terletak pada pribadi sukarno dengan kedudukannya selaku presiden diman sukarno dengan keinginannya menggunakan kewihawaanya selaku kepala negara langsung mengatur segala persoalan masyarakat sehingga mendapat pertentangan dari golongan lain yang berbeda haluan dengan Sukarno,*” *Konsepsi negara Indonesia* (Jakarta: Darul Falah penerbit buku Islam Kaffah, 1999), hlm. 76-77.



sebelumnya<sup>9</sup> sebagai reaksi terhadap situasi saat itu pemerintah orde baru menerapkan semboyan “politik no, pembangunan yes”.<sup>10</sup> Untuk mendukung program ini selain ABRI sebagai faktor pendukung utama, pemerintah orde baru juga mendekati teknokrat sekuler atau kristen, dan pengusaha non pribumi, segera diambil kebijaksanaan seperlunya untuk mendukung pembangunan ekonomi. Modernisasi dan strukturisasi kehidupan politik nasional tak pelak merupakan upaya keluar dari situasi lama (Orla) yang ditandai dengan adanya krisis ekonomi berkepanjangan serta pembangunan yang tersendat-sendat, inflasi yang tinggi dan stabilisasi nasional yang tak kunjung mapan akibat perebutan kekuasaan dan perang ideologi untuk negara yang baru merdeka.<sup>11</sup>

Upaya-upaya untuk memepertahankan rezim yang baru berdiri, dibuatlah undang-undang. Untuk memdukung perjalanan rezim, upaya-upaya ini dibuat untuk memperkuat eksekutif. Diantara upaya-upaya ini :

1. Memperluas peranan sosial politik ABRI yang berbeda dari doktrin “jalan tengah” yang diusulkan Jenderal A.H Nasution.
2. Menciptakan sistem pemilu yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan status quo. Misalnya konsep “masa mengambang” dimana tidak akan ada partai-partai politik yang aktif di desa-desa sepanjang masa

---

<sup>9</sup> Abdul Azis Thaha, *Op. Cit.*, hlm. 186.

<sup>10</sup> Indrio Somego, *Demitalagisasi politik Indonesia, (mengusung elitisme dalam orde baru)*, (Jakarta : PT Pustaka Cresindo, 1999), hlm. 4.

<sup>11</sup> Al-Chaedar, *Reformasi Prematur. (Jawaban Islam terhadap Reformasi Total)*, (Jakarta : Darul Falah, Penerbit Buku Islam. 1999), hlm. 4.

akselerasi modernisasi 25 tahun, tapi hanya boleh bergerak di Dati I (propinsi) dan Dati II (kabupaten). Tujuannya untuk mendepolitisasi penduduk Indonesia.<sup>12</sup>

3. Menjadikan Golkar sebagai mesin pengumpul suara bagi pemerintah yang didukung penuh oleh ABRI dan Kapolri.
4. Membiarkan bidang legislative dan yudikatif dalam posisi lemah subordinal di bawah eksekutif.
5. Dibentuknya organisasi – organisasi korporatis yang ditujukan untuk memobilisasi dan sekaligus mengendalikan kegiatan berbagai kelompok dalam masyarakat oleh pemerintah.
6. Diterapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang membatasi gerak masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Diantaranya kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) berdasarkan SK nomor 0156/U/1978 yang dijadikan pedoman normatif bagi peraturan kampus sehingga mengarahkan mahasiswa pada jalur akademik dan menjauhkan dari politik praktis.<sup>13</sup>

Dengan format politik diatas maka tak mengherankan bila bangsa Indonesia berhasil mengatasi masa-masa krisis dalam kurun tiga dasawarsa .negara dapat mencapai berbagai kemajuan persatuan dan kesatuan bangsa dirasakan semakin mantap walaupun dirasakan masih terjadi gejolak. Stablitas dan integrasi nasionalnya

---

<sup>12</sup> Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer*, (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 80.

<sup>13</sup> Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti, (Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia, 1908-1998)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 118.

secara umum tidaklah terancam terutama setelah diterimanya pancasila sebagai satu-satunya azas bernegara .

Pendapatan perkapita naik sepuluh kali lipat dari masa awal orde baru dan fungsi-fungsi pemerintahan sudah berjalan dengan lancar .<sup>14</sup>

### **B. Tinjauan Sosiologi Politik Umat Islam Menjelang Berdirinya Orde Baru**

Dekret Presiden 5 juli 1959 mengawali lahirnya demokrasi terpimpin dengan Soekarno sebagai pucuk pimpinan .Menurut “ KH.Firdaus A. N ” ada unsur positif dan negatif dengan lahirnya dekrit ini ” unsure negatifnya membawa presiden menjadi seorang diktator dalam demokrasi terpimpin sedang positifnya, seharusnya Indonesia kembali pada Piagam Jakarta yang seutuh-utuhnya, yang sangat diharapkan politisi Islam .”<sup>15</sup>

Dengan terbentuknya DPRGR pada bulan April 1960 terjadi kolaborasi antara Soekarno dengan partai-partai Islam sampai jatuhnya rezim demokrasi terpimpin, pada periode ini partai-partai Islam dibawah pengaruh kuat NU.

NU sering dilukiskan dengan pesantren dalam politik, ini artinya peran kyai dalam partai sedemikian besar, hampir tanpa batas .Saifudin Zuhri misalnya menggambarkan Kyai Wahab Chasbullah sebagai tokoh yang sangat berperan dalam perjalanan NU.<sup>16</sup> Reaksi politik para ulama dan aktifis dalam tubuh NU terpecah jadi

---

<sup>14</sup> Indrio Somego, *Op-Cit*, hlm. 4-6.

<sup>15</sup> Firdaus A.N, “*Dosa-dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru yang tidak boleh terulang lagi di era reformasi*”, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 80.

<sup>16</sup> Ahmad Syafi’I Ma’arif, *Islam dan Politik ... Op.Cit.*, hlm 81

dua, yang satu berpihak pada Soekarno dan satunya lagi berpihak pada Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

Kekerasan-kekeraan telah muncul secara sporadis saat terjadi aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI untuk melaksanakan *Land-Reform* sejak 1964. Pihak komunis menyebut para pemilik tanah muslim sebagai “setan desa” atau *borjuis*. Sebagai refleksi pertikaian antar kelas terselubung antara ulama-ulama pemilik tanah dengan buruh tani. Perseteruan semakin seru dengan semakin besarnya pengaruh PKI pada bulan Mei 1965 PKI mengaku memiliki 3 juta anggota partai dan 20 juta anggota organisasi-organisasinya.

NU mempersiapkan diri menghadapi pertempuran-pertempuran yang diduga semakin seru. Organisasi kepemudaan NU, Ansor, membentuk Barisan Serba Guna (Banser) pada tahun 1964. karena merasa yakin PKI telah merembes ke dalam tubuh angkatan bersenjata. Cabang-cabang diperintahkan untuk siaga dengan pedoman yang diberikan saat itu ialah menempatkan anggota-anggotanya yang pernah mempunyai pengalaman ketentaraan pada jabatan Ketua Cabang Ansor atau paling tidak sebagai penasehat Banser.<sup>17</sup> Pertengahan 1964 PKI menyerang HMI dimana-mana, serta meminta Presiden Soekarno agar HMI dibubarkan. Melihat gelagat kaum komunis ini umat Islam secara keseluruhan disadarkan akan adanya *muve* politik yang dilakukan komunis yang sangat membahayakan bangsa dan negara.

Tuntutan PKI tentang peibubaran HMI tidak pernah menjadi kenyataan, karena Menteri Agama (Syaifuddin Zuhri), umat Islam, dan Angkatan Darat,

---

<sup>17</sup> Andree Feillard, *NU Vis-A-Vis Negara*. (Yogyakarta : LKIS, 1999), hlm. 71-72.

membela HMI dari rongrongan PKI. GASBINDO (Gabungan Sarikat Buruh Indonesia) di bawah pimpinan Jusuf Wibisono, Agus Sujono dan lain-lain juga mendapat serangan PKI, tetapi tidak segenar yang dialami HMI. Kebencian PKI terhadap GASBINDO disebabkan karena GASBINDO berasal dari SBII (Syarikat Buruh Islam Indonesia) yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi.<sup>18</sup>

Ketegangan meledak, tanggal 1 Oktober 1965 adalah sebagai hari H bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan semua kekuatan *progresif refolusioner*, keduanya bersatu dalam gerakan 30 September (Gestapo) pasukan-pasukan didatangkan menuju Ibu Kota oleh perwira-perwira yang berpihak pada PKI, sementara itu sukarelawan-sukarelawati komunis telah dilatih militer. Dewan Refolusi dibentuk dan mengambil inisiatif untuk menyingkirkan para Jenderal yang dianggap reaksioner yang merencanakan perebutan kekuasaan lewat kudeta dengan istilah “Dewan Jenderal”.<sup>19</sup>

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Oktober 1965 Jenderal Soeharto yang menjadi Panglima Kostrad menyatakan akan membasmi PKI sampai ke akar-akarnya. Beberapa hari kemudian Soekarno memutuskan untuk menghindari perlawanan fisik, akan tetapi pemberontakan komunis menjadi target utama angkatan bersenjata dan NU menyerukan anggotanya untuk membantu ABRI memulihkan keamanan.

Muhammadiyah juga mendukung pengganyangan komunis dengan mengeluarkan sebuah fatwa tertanggal 11 Nopember 1965 yang mengumandangkan

---

<sup>18</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik... Op. Cit.*, hlm. 117-118.

<sup>19</sup> O. G. Raeder, *Anak Desa (Biografi Presiden Soeharto)*, (Jakarta : Gunung Agung, 1976), hlm. 28

Perang Jihad melawan kaum komunis adalah wajib. Akan tetapi dengan tambahan harus dilakukan tanpa kekerasan yang merugikan, menimbulkan fitnah, dan rasa dendam. Sejak 8 Oktober 1965 para pemuda muslim membakar markas besar PKI di Jakarta dengan mengobrak-abrik dan menjarah rumah-rumah tokoh komunis.<sup>20</sup>

Pada tanggal yang sama di Taman Suropati Jakarta partai-partai politik seperti NU, IPKI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan berbagai organisasi masa melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila, serta mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI beserta ormas pendukungnya, membersihkan kabinet DPRGR, MPRS, serta lembaga-lembaga negara lainnya dari unsur-unsur gerakan 30 September.

Mahasiswa juga mulai bergerak, atas saran menteri perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan (PTIP) Brigjen TNI Dr. Syarif Toyeb menganjurkan agar gerakan mahasiswa lebih terpadu. Atas saran itu maka terbentuklah "Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia" (KAMI) dan diikuti dengan munculnya kesatuan aksi yang lain, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPRI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI).

Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mencetuskan 3 tuntutan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) kepada pemerintah. Adapun isi TRITURA yaitu :

- a. Bubarkan PKI
- b. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G 30-S / PKI

---

<sup>20</sup> Andree Feillar, *Op. Cit.*, hlm. 72-73

c. Turunkan harga-harga<sup>21</sup>

KAMI menggerakkan penduduk ibu kota untuk melawan PKI, mengorganisasi banyak demonstrasi dan mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat. Dipihak lain terdapat tokoh-tokoh NU yang berhati-hati, yang sekalipun anti komunis namun tetap dekat dengan Soekarno. Dukungan Nu terhadap Soekarno terus berlanjut bahkan sampai pelimpahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966.

Demikianlah pada bulan Juni 1966 saat nasib Soekarno nampak sudah ditentukan, karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memutuskan untuk tetap mengangkat Soekarno sebagai Presiden namun tidak lagi “Seumur Hidup”. Kyai Wahhab Hasbullah menyatakan dukungannya dengan menegaskan bahwa NU akan mengajukannya sebagai calon disemua pemiluhan umum.<sup>22</sup>

Sejak hari-hari pertama Orde Baru dalam tubuh NU sendiri terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok Soekarnoisme yang dipimpin Idham Cholid dan kelompok radikal yang menghendaki perubahan yang lebih cepat dan mendukung tatanan politik yang baru. Kelompok ini dipimpin oleh Subchan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, (Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 134-136.

<sup>22</sup> Andree Feillar, *Op. Cit.*, hlm. 85-87.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 94.

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN POLITIK SOEHARTO TERHADAP UMAT ISLAM**

Dalam periode awal konsolidasi pemerintahan orde baru timbul optimisme dikalangan umat Islam akan adanya romantisme perjuangan menumbangkan orde lama yang penuh retorika dan demokrasi. Akan tetapi dalam realitasnya, keinginan ini berbenturan dengan strategi pembangunan orde baru, yaitu marginalisasi peranan partai-partai politik dan mentabukan pembicaraan masalah ideologis (selain Pancasila) terutama yang bersifat keagamaan.

Sejak itu hubungan Islam dengan negara bersifat Antagonistic, hal ini berlangsung sampai pada masa penerapan azas tunggal, yang bermula pada pidato Presiden Soeharto di depan Sidang DPR tanggal 18 Agustus 1982 “ketegangan konseptual” yang tercipta menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk saling memahami posisi masing-masing. Karena itulah, pada masa ini disebut dengan masa Resiprokat kritis. Setelah semua ormas dan orsospol Islam mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya azas. Hal ini menandai hubungan yang bersifat Akomodatif.<sup>1</sup>

#### **A. Hubungan Yang Bersifat Antagonistik (1966-1981)**

##### **1. Gagalnya Pembentukan PDII**

Partai Demokrasi Islam Indonesia ( PDII ) rencananya akan didirikan oleh Muh.Hatta bersama beberapa orang yang lebih muda yang berkecimpung dalam HMI

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hlm. 240.



dan PII<sup>2</sup> Selain itu juga sebagai penggagas yaitu Deliar Noer yang dekat dengan kelompok Petisi 50.<sup>3</sup> Berbagai persiapan dilakukan secara intensif, mulai 1965 di rumah Muh. Hatta dan ruangan Universitas Islam Jakarta. Tahap awal persiapan dengan mencari persamaan pengertian tentang dasar, tujuan, dan program partai, sampai hal-hal yang bersifat teknis.

Beberapa orang ulama, seperti K.H. Abdullah Syafii dan Ustad H. Jamalullail, juga tokoh GPII (Anwar Harjono) Tokoh Masyumi ikut menyokong usaha ini. Beberapa kalangan Islam yang tergabung dalam Badan Amal Muslimin, yaitu forum komunikasi antar organisasi-organisasi Islam dibidang sosial dan budaya, seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Jamiah Washliyah, Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) juga ikut mendukung.<sup>4</sup>

Pada tanggal 11 Januari 1967, Muh. Hatta mengirim surat pada Presiden Soeharto mengenai maksud berdirinya PDII, setelah mendapat kesan bahwa Kepala Negara akan mempertimbangkannya. Karena waktu peresmian PDII sudah dekat, maka dikirimkan surat yang kedua tanggal 11 April yang berisi langkah-langkah yang telah diambil dalam persiapan pendirian partai. Pada tanggal 11 Mei 1967, Muh. Hatta mengirim surat yang ketiga kalinya kepada Presiden Soeharto dengan melampirkan susunan kepengurusan PDII. Akhirnya surat balasan dari presiden tiba tanggal 17 Mei 1967 pada saat PDII akan diumumkan yang isinya, bahwa pemerintah

---

<sup>2</sup> Deliar Noer, *Muhamad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 633.

<sup>3</sup> Eep Saefullah Fatah. *Bangsa Saya yang Menyebarkan*. (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 63.

<sup>4</sup> Deliar Noer, *Op.Cit.*, hlm. 635.

tidak memberikan persetujuannya dengan penekanan pada ketetapan MPRS tentang penyerdehanaan partai. Soeharto juga mengungkapkan kebijakanaannya untuk memberi kesempatan adanya satu partai Islam baru.<sup>5</sup>

## 2. Gagalnya Rehabilitasi Masyumi dan Berdirinya Parmusi.

Pada Tanggal 16 Desember 1965 dibentuk badan koordinasi amal muslimin yang terdiri atas 16 organisasi Islam yang bermaksud merehabilitasi Masyumi.<sup>6</sup>

Usaha menghidupkan kembali Masyumi pada masa pemerintahan Soeharto ini dilakukan secara sungguh-sungguh. Beberapa lobbying tingkat tinggi dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut, tetapi kalangan ABRI agak keberatan dengan tampilnya mantan tokoh Masyumi. Rasa keberatan ini bisa dimaklumi mengingat keterlibatan para tokoh Masyumi diantaranya: M Natsir dalam pemberontakan PRRI.

Atas kiriman surat dari tokoh-tokoh Islam yang memohon izin merehabilitasi Masyumi, Presiden Soeharto membalasnya dengan berkirim surat kepada Prawoto Mangku Sasmito yang isinya penolakan terhadap rehabilitasi Masyumi.

Setelah “Vonis Mati” terhadap Masyumi turun, para pemrakasanya berupaya membentuk wadah parpol yang lain kemudian diberi nama Parmusi pada tanggal 7 April 1967 oleh BKAM.

Partai ini diharapkan dapat menampung aspirasi politik umat Islam. Dalam konggres I Parmusi 4-7 November 1968 di Malang Jawa Timur tampil ketua umum

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 648.

<sup>6</sup> Abdul Azis Thaba, *Op.Cit.*, hlm. 246.

pilihan peserta yaitu Muh.Roem.Meskipun mantan Masyumi namun dianggap moderat dan bersih dari dosa.<sup>7</sup>

Pemerintah masih mencurigai dengan tampilnya Muh.Roem, setelah melalui konsensus antara pemrakarsa dengan pemerintah akhirnya melalui keputusan presiden no 70/1968 pada bulan Februari 1968 disahkan berdirinya Parmusi dibawah pimpinan Jarnawi Hadi Kusumo dan Lukman Harun. Sejak itu hubungan Parmusi dengan pemerintah menjadi dingin. Pada tahun 1970 John Naro dan Kadir tampil menuduh pimpinan Parmusi bersikap menentang ABRI Sambil mengangkat dirinya membentuk formatur untuk membentuk pimpinan baru. Dalam menghadapi kemelut ini pemerintah pada tanggal 20 November 1970 mengeluarkan surat keputusan no 77 / 1970 untuk mengubah pimpinan Parmusi dengan membentuk Haji Muhammad Mintareja sebagai ketua umum baru<sup>8</sup>.

Seorang penulis dalam majalah suara Muhammadiyah menyampaikan unek-uneknya "Orang yang berambisi besar tidak akan segan-segan menggunakan cara-cara yang pernah dipraktekkan oleh Gestapu oleh PKI, untuk mencapai tujuannya yakni main kup. Demikian kita sama-sama mengetahui bahwa Naroka ( Naro dan Kadir ) telah melakukan kup atau pembajakan terhadap pimpinan pusat partai muslimin yang sah .....

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 247.

<sup>8</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia ( Sebuah Potret Pasang Surut)*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 157-158.

Tujuannya jelas ialah hendak menghancurkan kekompakan keluarga besar bulan bintang”.<sup>9</sup>

### 3. Aliran Kepercayaan dalam Sidang Umum MPR 1973.

Dalam Sidang MPR, usulan aliran kepercayaan diajukan oleh FKP berdasarkan pasal 29 ayat 2 menurut pasal tersebut dibedakan antara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini FPP menolak keras, seperti yang tercantum dalam ucapan Cholid Mawardi dalam pandangan umum. Fraksi persatuan menghimbau cara penghayatan kebatinan untuk sadar dan kembali kepada agama masing-masing. Cholid Mawardi mengusulkan agar aliran kepercayaan /paham keagamaan kembali kepada induk agamanya masing-masing.<sup>10</sup> Adapun rumusan mengenai pengakuan kepercayaan oleh negara dalam GBHN, ketetapan MPR. RI. NO. IV/ MPR /1973 /22 Maret 1973.<sup>11</sup>

Dalam “Harian Abadi” ( Tajuk rencana 29-3-1973) terbaca : “ Dalam kedua pasal dalam GBHN diatas ini Islam disederajatkan dan disenafaskan dengan ratusan kepercayaan yang tersisa di Indonesia. Dari hari Proklamasi 1945 sampai sidang MPR Maret 1973 Islam tidak pernah disamakan dengan ratusan kepercayaan yang simpang siur itu.

<sup>9</sup> Tan Lelana, “Perombakan PP Partai Muslimin”. *Suara Muhammadiyah No.17- 18 Thn. ke - 50 197*), hlm. 5.

<sup>10</sup> *Tempo*, 21 Maret 1973, hlm. 5

<sup>11</sup> Rahmat Subagya, *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, dan Agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1976), hlm. 125.

Kepercayaan itu bukan agama, tetapi dikelompokkan kedalam spiritualisme yang dijalinan kepada ikatan- ikatan batin atau rohaniah dalam bentuk kepercayaan takhayul, gugon Tuhan, bijgeloof atau supersition berciri keberhala-berhalaan animisme dan kedewa-dewaan.<sup>12</sup>

Setelah mengalami pembicaraan yang alot, aliran kepercayaan dimasukkan dalam GBHN setelah mengalami beberapa perubahan. Kata- kata “ kebatinan” diganti dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan dianggap sebagai keagamaan kerohanian tersendiri.

Dengan dimasukkannya aliran kepercayaan kedalam GBHN, maka penganut aliran kepercayaan mulai mengembangkan alirannya, walupun tetap memeluk agama induknya. Hal ini telah diantisipasi oleh FPP.<sup>13</sup>

#### 4. Rancangan Undang-Undang Perkawinan.

Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan RUU Perkawinan. Sebulan sebelum RUU tersebut diajukan, timbul reaksi keras dari lapisan masyarakat muslim ; melalui khutbah- khutbah Ju`mat, pengajian, berbagai tulisan di koran dan majalah serta demonstrasi dan berbagai pernyataan Ormas Islam yang menolak RUU karena dianggap bertentangan dengan agama Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.125.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, hlm. 255-256.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.256

Selain ulama dan masyarakat Islam, tokoh proklamator Moh. Hatta juga mengajukan keberatan atas RUU perkawinan itu. Menurutnya banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan agama Islam. Moh. Hatta menilai khusus pasal 11 dalam RUU itu yang membolehkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama (termasuk Islam) lebih lanjut Moh. Hatta menyarankan presiden Soeharto untuk mencabut RUU yang menghebohkan itu. Pemerintah akhirnya membentuk RUU yang baru yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>15</sup>

RUU itu telah menghadapi oposisi yang kuat dari kelompok Islam di parlemen. Di luar parlemen kekuatan Islam juga memperlihatkan ketidaksetujuannya terhadap RUU tersebut. Organisasi pemuda Islam, khususnya generasi muda Islam Indonesia ( GMII ) mengadakan demonstrasi untuk menentang RUU tersebut. Sebagian kalangan Islam menganggap RUU tersebut sebagai karya kelompok Ali Murtopo<sup>16</sup>.

Soeharto menggambarkan perlawanan kuat yang dilakukan golongan Islam militan, katanya “perlawanan kuat yang tidak disangka-sangka dan jarang kejadian telah dilancarkan oleh golongan Islam yang militan dengan alasan bahwa RUU itu bertentangan dengan undang-undang agama dan pengajaran. Sekelompok kira-kira 400 pemuda menyerbu DPR dan telah mengganggu sidang-sidang parlemen.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Deliar Noer, *Op.Cit.*, hlm. 680-681.

<sup>16</sup> Leo Surya Dinata, *Golkar dan Militer Study tentang budaya politik* (Jakarta : LP3ES, 1992), hlm. 76-78.

<sup>17</sup> O.G Raeder, *Anak Desa ( Biografi Presiden Soeharto )*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 1976), hlm. 288.

Akhirnya pemerintah menurunkan tempo pemaksaannya di DPR dan bersedia melakukan kompromi. Beberapa *lobbying* diadakan di DPR atau di luar DPR. Akhirnya *lobbying* membuahkan hasil dengan dicoretnya pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Presiden Soeharto memberikan jaminan bahwa RUU yang semula sejumlah 73 pasal diciutkan menjadi 67 pasal. Undang-undang ini mengandung azas *monogamy* dan dijiwai hukum-hukum agama.

Dalam sidang DPR akhirnya RUU itu disahkan menjadi UU no 1 tahun 1974 tentang UU perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973<sup>18</sup>

#### §. Masalah Perjudian

Umat Islam bereaksi keras dalam masalah perjudian. Pada awal tahun 1970 – an pemerintah melalui gubernur mengizinkan pembukaan kasino, steam bath, Night club dan sarana hiburan lainnya. Pemimpin ormas-ormas dan ulama' menyatakan keberatan dan protes kepada pemerintah. Bahkan ceramah dan kutbah kutbah di masjid banyak membicarakan masalah ini. Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin berdalih bahwa pajak yang ditarik dari sarana hiburan itu merupakan sumber keuangan yang sangat besar bagi pemerintah daerah dalam pembangunan Jakarta.

Seorang anggota Muhammadiyah di Tulung Agung merengkuh di tahanan Kodim karena memprotes perjudian. Dalam rubrik "hati ke hati" majalah panji masyarakat" dan lebih parah lagi jika tuduhan telah meningkat pada anti pemerintah, yang menentanginya dari masjid itu disamakan PKI, maka jalan paling aman tak lagi

---

<sup>18</sup> Abdul Azis thaba, *Op.Cit.*, hlm. 261.

berbicara menolak kemaksiatan, sehingga kemaksiatan menjadi kemaksiatan biasa di tengah-tengah kota, bahkan orang merasa main judi di kasino menghibur diri di night club dan steam bath sebagai suatu perbuatan yang menaikkan prestise sosialnya.<sup>19</sup>

Melihat reaksi yang meluas akhirnya pemerintah tidak lagi mengizinkan berdirinya sarana perjudian sedangkan yang telah ada akan ditertibkan.

### **B. Hubungan Yang Bersifat Resiprokat – Kritis (1982-1985)**

Pada periode ini hubungan antara Islam dan negara ditandai dengan proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali dengan *political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep azas tunggal bagi orsospol dan selanjutnya untuk seluruh ormas di seluruh Indonesia.

Gagasan azas tunggal pertama kali disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan didepan sidang pleno DPR tanggal 16 Agustus 1982 yang mengisaratkan bahwa batasan azas tunggal pada mulanya ditujukan pada partai politik dan Golongan Karya. Penerapan azas tunggal ini dilandasi oleh trauma masa lalu, terutama jatuh banggunya kabinet dalam system demokrasi parlementer akibat konflik ideologi dalam peringatan Maulud nabi Muhammad SAW Desember 1983 Presiden Soeharto kembali menegaskan perlunya azas tunggal bagi partai politik dan golongan karya serta juga bagi seluruh ormas di Indonesia.

Berbeda dengan Presiden Soeharto yang banyak mengajukan pertimbangan politik kenegaraan, maka Munawir Sadjali ( Menteri Agama ) menggunakan dalil akli

---

<sup>19</sup> *Panji masyarakat*, Thn XVI No. 163 1 Maret 1974, hlm. 4.



dan nakli dalam usahanya meyakinkan tokoh-tokoh Islam bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. hal ini disampaikan dalam peringatan Isro' Mi'raj 9 Mei 1983 di masjid Istiqlal<sup>20</sup>.

Setelah Pancasila di Islamkan terlebih dahulu, maka semua ormas dan orsospol mencantumkan pancasila sebagai satu-satunya azas. Pernyataan K.H. Muhamad Siddiq Rois 'Aam NU, mungkin dapat mewakilinya “ bentuk negara Indonesia dengan landasan ideologis Pancasila dan konstitusional UUD 1945 adalah bentuk final perjuangan umat Islam”

Sebagai konsekuensinya negara mulai melihat (*political look*) Islam dan umatnya. Kunjungan pejabat pemerintah dan ABRI ke pondok pesantren adalah salah satunya.

Letjen Harsudiono Hartas, kassospol ABRI pada saat SU MPR 1983 menandakan bahwa ABRI tidak mempersoalkan banyaknya tokoh-tokoh Islam dalam MPR Sikap curiga ABRI sudah terhapus.

Perubahan perilaku politik Soeharto tak lepas dari renggangnya Soeharto dengan ABRI. Pada awal ORBA dikenal asisten pribadi (*Aspri*) Ali Moertopo dan Sudjono Hoemardani yang banyak peranannya dalam perumusan kebijakan Orde Baru. Kedua pejabat ini memiliki think thank CSIS yang anggotanya banyak beragama Katolik.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, hlm. 262-264.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.320.

Soeharto menghapus Aspri pada tanggal 28 Januari 1974, walaupun telah diberikan penjelasan-penjelasan namun kritik Aspri masih berlanjut terhadap apa yang disebut pembatasan tanggungjawab menteri.<sup>22</sup>

Peristiwa malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 ada dugaan kuat bahwa gerakan mahasiswa telah dimasuki oleh orang-orang luar, dan dugaan diarahkan pada kegiatan didalam negeri untuk perebutan kekuasaan diantara penguasa.<sup>23</sup>

Perselisihan antara kalangan ABRI dengan presiden membawa Soeharto secara teratur ikut campur dalam penunjukan orang-orang kunci di ABRI. Orang yang loyal kepada Moerdani secara sistematis digantikan orang yang loyal kepada Soeharto.<sup>24</sup>

Dalam pengamatan ( Eep Saefullah Fatah ) peristiwa Malari memberi kesadaran pada Soeharto bahwa dalam posisinya ditengah kolektivitas militer, rentan dan potensial digoyahkan oleh friksi politik di dalam kekuasaan negara. Selepas Malari dilakukan penyeleksian ulang basis politik dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru. Selain gerakan kritis masyarakat direspon negara Dengan keras, birokrasi ditumbuhkan sebagai kekuatan politik besar antara lain dengan mengembangkan peranan sekretariat negara. Sementara Golkar sudah dapat diefektifkan sebagai organ penyambung kepemimpinan ORBA ke basis legitimasi politik riil ( rakyat).<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> O.G Raeder, *Op.Cit*, hlm. 277.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 356.

<sup>24</sup> Anders Uhlin, *Oposisi Berserak*, (Bandung : Mizan. 1998), hlm. 63.

<sup>25</sup> Eep Saefullah Fatah, *Bangsa Saya yang menyebarkan*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 71.

Selain konflik internal dengan ABRI Soeharto juga ingin mendemonstrasikan kekuasaannya, hal ini terlihat dari ucapannya “akan saya gebuk mereka, tidak peduli yang bersangkutan jenderal atau politikus yang mencoba melakukan tindakan inkonstitusional” ( dikutip diatas pesawat sepulang dari Moscow Uni Soviet).<sup>26</sup>

Dalam bursa calon wakil presiden pada SU 1983 Soeharto hanya mengajukan lima criteria yaitu : bersikap mental dan berideologi Pancasila dan UUD 1945, mempunyai integritas pribadi, cakap, mempunyai prestasi yang dibuktikan dalam karya dan diterima ( akseptabel ) oleh semua lapisan masyarakat yang dinyatakan dengan dukungan oleh kekuatan sospol yang besar dan dominan.

Bursa Wapres ini menjadi penting mengingat presiden Soeharto sendiri yang menyebutkan kemungkinan tidak dapat melaksanakan tugas di tengah jalan. Jenderal Purn Soeharto kini beumur 66 tahun, mengatakan hal ini pada penutupan rapim dan HUT ke-22 Golkar. Katanya “ Apabila saya dipilih kembali menjadi presiden RI untuk masa jabatan berikutnya hanya satu yang satu minta, bilamana dalam melaksanakan tugas nanti selama lima tahun ditengah jalan saya tidak mampu supaya diganti”.

Bursa Wapres mulai beredar kencang seperti Widjojo Nitisastro dan jendral purn Amir Machmud, bahkan sebulan menjelang SU MPR 1983, tiba-tiba ada yang mencalonkan Ali Moertopo dari FPDI komisi 1 DPR, meskipun Ali Moertopo menjawab tidak mampu.

---

<sup>26</sup> *Editor*, No. 37/ Thn. III/ 26 Mei 1990. hlm. 14.

Soeharto lebih memilih Oemar Wirahadikusuma sebagai pendamping karena Oemar adalah tokoh yang lebih banyak diam dan tanpa ambisi.<sup>27</sup>

### C. Hubungan Yang Bersifat Akomodatif (1985-1998 )

Setelah melalui political test, umat Islam dinilai oleh negara “lulus ujian,” umat Islam pun mulai memahami bahwa kebijakan negara tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam (sekularisasi) maka dimulailah hubungan yang bersifat akomodatif<sup>28</sup>

Perubahan sikap pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto, khususnya dalam hubungan dengan umat Islam, dilukiskan oleh Anwar Harjono sebagai “Perubahan iklim atau perubahan cuaca. “Banyak indikasi yang dapat dijadikan alasan, diantaranya : Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Ketika UU pokok perbankan yang lama (UU. NO. 14 Th.1967 )masih berlaku yang menggunakan sistim bunga. Soeharto adalah aktor utama dibalik sejumlah kebijakan yang “melegakan umat Islam”, selain BMI, juga disahkannya RUU Peradilan Agama, dan RUU. Pendidikan Nasional, dicabutnya larangan mengenakan Jilbab bagi siswi sekolah umum, dicabutnya SDSB. Berikut ini beberapa hal yang mendukung hubungan yang bersifat akomodatif.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Editor*, No. 28/ thn.I. 5 Maret 1988. hlm 9- 10.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, hlm. 278.

<sup>29</sup> Adian Husina, *Soeharto 1998*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 43-45.

## 1. RUU Pendidikan Nasional

Konsep awal yang disiapkan oleh Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional (KPPN), 1979, pendidikan agama dicantumkan. Komisi ini dibentuk oleh menteri Pdan K Doed Joesoef 1978, dengan prof Slamet Santoso sebagai ketua 1 dan prof Sumitro Djojohadikusumo sebagai ketua

Sebagian materi RUU yang sekarang diambil dari produk KPPN, yang ketika itu berjudul “Pokok-Pokok Pikiran Pembaruan Pendidikan Nasional” yang disusun Dep. Pdan K, 19 Januari 1987, tercantum pasal yang mengatur isi kurikulum (pasal 48) yang menyatakan Agama merupakan salah satu dari tujuh kelompok yang menjadi isi kurikulum.<sup>30</sup>

UU No.2 Th. 1989 menjadi acuan sistim pendidikan, sehingga mempermudah tercapainya kesepakatan perihal penyelenggaraan pendidikan nasional.<sup>31</sup>

Bila RUU ini disetujui implikasinya sekolah sekolah Kristen harus memberikan pelajaran agama Islam bagi murid yang Muslim.<sup>32</sup> Umat Kristiani sangat menentang alasannya pelajaran agama dapat diperoleh dimana saja.

Akhirnya UU itu menetapkan guru agama harus menganut agama yang sama dengan yang mereka ajarkan dan agama murid (pasal 17 ayat 1). Namun penjelasan UU itu lebih lunak pada penerapannya dengan menegaskan sekolah “Agama” tidak

---

<sup>30</sup> *Tempo*, 15 Agustus 1988, hlm.22

<sup>31</sup> Fuad Hassan, “Depdikbud Sadari Tanggung Jawabnya Laksanakan Pembangunan”, *Suara Merdeka*, 3 Mei 1991

<sup>32</sup> *Editor*, 11 Maret 1989, hlm. 23-24

diharuskan memberikan pelajaran agama lain selain yang dianut. Mengenai sekolah dasar dan Universitas tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Sebuah peraturan dari Dep. P dan K menyusul, memberikan kebebasan pada pendidikan swasta agama, dan ini dianggap sebagai langkah mundur oleh kaum konservatif di ormas Islam.<sup>33</sup>

## 2. RUU Peradilan Agama

Pengajuan RUU Peradilan Agama merupakan bukti konsistensi pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan ketentuan –ketentuan UUD 45, yang telah ada undang-undang organiknya ( UU, No.14<sup>Th</sup> 1970 ).Hal ini merupakan bukti kebulatan tekad Orda Baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat.<sup>34</sup>

Menteri agama Munawir Sadjali yang membawa RUU. PA ke sidang DPR, ketika memberikan pengantar didepan lembaga perwakilan rakyat.<sup>35</sup>

FPDI mempertanyakan rancangan ini, sementara di luar gedung DPR timbul reaksi yang pro dan kontra.Golongan non Muslim sangat hati-hati melihat RUU PA tersebut. Hal ini sangat dimaklumi karena RUU PA atas usulan pemerintah.

Secara individual seperti Frans Magnis Suseno, pastor Katolik, memperingatkan bahayanya negara theokratis, selain itu juga Mulya Lubis seorang advokad keamanan menolak RUU PA itu, juga Amir Machmud dan Soeprapto

---

<sup>33</sup> Andree Feillard, *NU Vis- a- Vis Negara*, (Yogyakarta : LKIS, 1999), hlm. 395.

<sup>34</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 84.

<sup>35</sup> *Tempo*, 4 Februari 1989 dan 24 juni 1989. hlm 23-25.

“Syariat Islam bagaimanapun tidak bisa masuk kedalam hukum kita, karena hukum kita adalah hukum pancasila.”<sup>36</sup> Reaksi yang pro juga datang dari kalangan Islam seperti: Alamsyah, Daud Ali, dan Ismail Sunny.<sup>37</sup>

Akhirnya pada bulan Desember 1989, DPR menyetujui rancangan undang-undang yang memperluas jangkauan pengadilan agama Islam menjadi 304 dan 18 pengadilan banding. Hal ini merupakan akibat logis dari undang-undang tahun 1970 yang menetapkan 4 lembaga peradilan Islam.<sup>38</sup>

Dari segi perundang-undangan, UU No.7 Th 1989 adalah lompatan 100 tahun, dan dari segi hukum substantif adalah lompatan 100 windu. Karena itulah RUU PA begitu ramai dibicarakan<sup>39</sup>

### 3. Kasus Monitor

Bermula dari hasil angket asal-asalan yang dilakukan tabloid Monitor, edisi 15 Oktober 1990. Dalam angket tersebut nama Nabi Muhammad SAW. Berada di peringkat ke-11 di bawah Arswendo sendiri yang berada di peringkat ke-10. Artikel tersebut segera menimbulkan reaksi keras umat Islam.

Pemerintah nampaknya tidak mau terkesan lamban, akhirnya pemerintah mengirimkan peringatan keras kepada monitor. Departemen Penerangan menurunkan tulisannya yang berjudul : 50 tokoh yang dikagumi pembaca kita, yang dimuat 15

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, hlm 284.

<sup>37</sup> *Tempo*, 24 Juni 1989, hlm 22-23.

<sup>38</sup> Andree Feillafd, *Op.Cit.*, hlm. 391.

<sup>39</sup> Bustanul Arifin, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Oktober 1990, dinilai bisa menimbulkan penafsiran keliru, bahkan menyinggung perasaan umat Islam, serta dapat menjurus pada pertentangan yang berbau “Sara”.

Setelah pemuatan daftar tokoh itu banyak yang mendatangi kantor Monitor di Jl. Palmerah Barat 33-37, Jakarta Barat. Para pendemo antara lain beberapa mahasiswa dan pengurus Musholla Universitas Nasional. Disertai permohonan maaf kepada Bpk. Presiden Soeharto serta nama-nama lain yang tercantum dalam tabel Monitor, para demonstran dan umat Islam menyatakan merasa tersinggung dan terhina atas pencantuman Nabi Muhammad SAW pada urutan ke-11.<sup>40</sup>

Dalam pertemuan dengan pimpinan Muhammadiyah Bpk Soeharto menjelaskan peristiwa Monitor ini. Pak Harto menjawab: masalah ini sudah menyangkut masalah sara, siapapun yang melakukan tindakan yang dapat meresahkan dan menyangkut sara harus bertanggung jawab.<sup>41</sup>

Setelah ledakan kemarahan di mana-mana, pada tanggal 23 Oktober 1990 Arswendo mulai dihabisi. Mula-mula lewat pembatalan SIUP Monitor (SK. Menpen No.162 / Kep / Menpen / 1990 ). Selain pembatalan SIUP, wartawan penulis cerpen dan novel produktif ini juga di pecat dari keanggotaan PWI Jaya, terhitung 23 Oktober 1990, bahkan terhitung tanggal 24 Oktober 1990 Arswendo resmi menjadi tahanan Polda Metro Jaya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Editor* No.7 / Thn IV / 27 Oktober 1990 hlm.12-13

<sup>41</sup> *Editor* No.8 / Thn IV / 3 November 1990 hlm.15

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.12-13



#### 4. Bantuan Untuk Da'wah

Pertumbuhan da'wah juga tercermin dari peningkatan jumlah tempat ibadah ( Masjid, Langgar, dan Mudholla ). Dalam kurun 16 Th.pada Th 1975 (378.799) menjadi (550676) pada tahun 1991 suatu peningkatan yang melebihi peningkatan jumlah penduduk.

Bantuan negara terhadap pembangunan atau perbaikan tempat ibadah juga meningkat, pada tahun 1985/1986 bantuan rutin untuk masjid meningkat 6 kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya. Jumlah Masjid yang menerima bantuan juga meningkat dari 198 pada tahun 1979-1984 menjadi 3.966 pada tahun 1985-1986.

Selain itu pemerintah juga menyusun sebuah program khusus yang menyalurkan rata-rata sekitar 705 juta Rupiah bagi setiap propinsi untuk membangun dua mesjid di masing-masing daerahnya. Selain itu, yayasan yang didirikan Presiden Soeharto pada tahun 1968. yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila sangat aktif dalam pembiayaan dan pembangunan mesjid. Pada tahun 1984 yayasan ini membangun enam mesjid perbulan dengan biaya 46 juta rupiah.per mesjid..

Selain itu dana baru dianggarkan untuk dakwah sejak 1985. Departemen Agama membantu sekitar 30 lembaga dakwah kecil dengan memberi mereka kurang lebih 21 juta rupiah per tahun.

Pemerintah juga mengambil inisiatif untuk mendukung dakwah di daerah terpencil, termasuk rencana untuk mengirimkan seribu dai ke daerah transmigrasi. Dalam rangka menunjang program ini Muhammadiyah, NU, dan DDII diundang untuk mengajukan calon dai mereka.

Pemerintah juga memberikan bantuan untuk mendatangkan dai sejuta umat (K.H Zainudin M Z) dan Roma Irama, bantuan ini juga tidak sedikit karena diperlukan beberapa truk untuk mengangkut peralatan yang didatangkan dengan kapal.<sup>43</sup>

## 5. BMI

Bank Muamalat Indonesia berdiri sejak 1 November 1991 dengan modal dasar Rp 500 Miliar. Pendirian BMI ditandai dengan penandatanganan akta pendirian oleh wakil – wakil dari 145 pendiri di depan Notaris dengan modal setoran Rp. 100 Miliar, satu hari kemudian permohonan izin prinsip pendirian BMI secara resmi diajukan kepada Menteri Keuangan.<sup>44</sup>

Pendirian BMI yang lancar ini lebih disebabkan faktor politik karena kelahiran BMI hanyalah salah satu tanda dari beberapa prestasi positif yang dicapai umat Islam dalam mencari jalan baru di luar jalur politik<sup>45</sup>

Atas restu dan izin Presiden Soeharto Bank tanpa bunga di Indonesia akhirnya bisa berdiri, bahkan Presiden sendiri memberi modal pinjaman sebesar Rp. 3 miliar dari kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila tanpa bunga dan tanpa batas waktu pinjaman. Yayasan DAKAP, SUPERSEMAR, DHARMAIS dan Purna Bakti Pertiwi yang dipimpin Pak Harto dan keluarganya dengan memberi saham masing – masing

<sup>43</sup> Andriea Faillafid, *Op.Cit.*, hlm. 330-331.

<sup>44</sup> *Java Pos*. "BMI mengentaskan Rakyat dari Kemiskinan", 2 November 1991, dikutip dari fakta dan opini klipang dua mingguan edisi 5, yogyakarta, 1991-1992, hlm 40.

<sup>45</sup> *Suara merdeka*, "Lahirnya Bank Mu'amalat, Periode mesra antara umat Islam dengan Pemerintah", dikutip dari fakta dan opini klipang dua mingguan edisi 5, yogyakarta, 1991-1992, hlm. 11.

Rp. 1 miliar. Secara pribadi Kepala Negara juga membeli saham BMI senilai Rp. 50 juta, nilai nominal selembar saham adalah Rp. 1000. Presiden lalu menjadi sponsor.

Mobilisasi dana berlangsung dalam suasana silaturahmi di rumah Pak Harto, sehingga target awalnya diulur dari Rp. 10 milyar syarat pendirian Bank menjadi Rp. 100 milyar. Hal ini tak lepas dari dukungan Soeharto.

BMI menjadi sebuah Bank istimewa, karena selain Presiden dan Wakil Presiden tercatat sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, sejumlah pengusaha kelas kakap seperti Aburizal Bakri, Fahmi Idris, Ponco Sutowo, dan Fadel Muhammad. Selain itu ada Oinar Abdullah mantan Dirut Bank Bumi Daya yang kini menjadi salah satu komisaris. Dari kalangan Cendekiawan dan Ulama Islam ada Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua PP Muhammadiyah Achmad Azhar Basyir, dan dari NU ada KH. Ali Yafi. Dan yang menjalankan roda perbankan adalah bekas direktur Bank Pacific.<sup>46</sup>

## 6. ICMI

Gagasan untuk menyelenggarakan simposium cendekiawan muslim dan sekaligus membentuk ikatan cendekiawan muslim se-Indonesia muncul dari sekelompok mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang yang merasa

---

<sup>46</sup> *Tempo*, "Bank Dengan Agungan Amanah", 9 – 11 – 1991 dikutip dari *Kuntum 2 Mingguan edisi 5*. hlm. 6.

prihatin melihat kondisi umat Islam seolah terjadi polarisasi dalam kepemimpinan umat.<sup>47</sup>

Pada Tanggal 8 Desember 1991 di Malang Jawa Timur terbentuklah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang diharapkan menjadi gudang pemikiran yang bukan saja berguna buat pemerintah tapi juga ormas Islam.<sup>48</sup>

Keberadaan ICMI menjadi eksklusif karena dipelukan syarat-syarat untuk menjadi anggota. Penolakan terhadap organisasi yang dipimpin B.J Habibie ini diantaranya Abdul Rahman Wahid yang menolak untuk bergabung dan lebih senang menangani kelas bawah<sup>49</sup> walaupun mendapat penolakan akhirnya terbentuk juga setelah melalui lobbying dengan tokoh-tokoh Islam dan mendapat sambutan yang hangat. Akhirnya dua Mentri (Emil Salim dan B. J Habibie) yang meminta kepada Presiden Soeharto untuk meyetujuinya. Akhirnya Presiden meyetujuinya dengan harapan pemerintah mempunyai peluang untuk dapat mengarahkan Cendekiawan Islam. Sesuatu yang sudah lama di tunggu-tunggu.<sup>50</sup>

Tidak hanya itu saja bahkan presiden sendiri yang membukanya dan ditutup Wakil Presiden Sudharmono. Hal ini merupakan kejadian penting dalam hubungan umat Islam dan penguasa.

---

<sup>47</sup> A. Makmur Makka, *B.J Habibie. Kisah hidup dan kariernya*, (Jakarta : Artikel Gema Insani Press), hlm. 133.

<sup>48</sup> Lukman Harun, *Tantangan Pembangunan Bidang Keagamaan*, (Surabaya: Gema Clipping Cervis, 1990), hlm. 38.

<sup>49</sup> A. Halim Mahfudz, *Dinamika Dan Gejala Konsolidasi Umat*, Wartawan Surya dalam Gema Clipping Cervis, hlm. 40.

<sup>50</sup> Andrie Feillard, *Op.Cit.*, hlm. 441.

Dalam pengamatan Azyumardi Azra kebangkitan ICMI harus dilihat dalam seluruh kerangka realitas dan perkembangan historis dalam dunia kecendekiawan beserta lingkungan yang mengatasinya baik pada tingkat global maupun nasional. Sensus dan dissensus antara cendekiawan dengan penguasa tetap ada.

Kerjasama yang efektif antara cendekiawan dan penguasa adalah prasyarat untuk menciptakan ketertiban dan kontinuitas dalam kehidupan umum.<sup>51</sup>

## 7. Penghapusan SDSB

Sejak 5 November 1993 hingga 16 November 1995 tak kurang sudah puluhan demonstrasi yang berlangsung tidak hanya di Jakarta melainkan meluas di 13 kota di luar Jakarta. Dan demo ini telah merambah istana negara yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai simbol negara. Berbagai elemen massa Islam dan mahasiswa melakukan demo secara bergantian.

MUI yang menyatakan SDSB haram. Secara politis, lembaga agama bentukan pemerintah itu bukan Cuma mendapat dukungan massa Islam melainkan juga dukungan dari para tokoh Islam yang ada di birokrasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya reaksi positif dari pembantu presiden yang tidak kurang ada tiga menteri yang menyetujui dihapuskannya SDSB.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Azyumardi Azra, "ICMI, Dari Syracuse ke Brain Trust", *Berita Buana*, 7 Desember 1990. Dikutip Abrur Muhammad, *ICMI dan Harapan Umat*, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhana, 1991), hlm. 50-51.

<sup>52</sup> *Editor* No 9/THN.VII/15 November 1993, hlm 63.

Dalam pertemuan antara Mensos Ny Inten Soeweno dengan Menteri Agama, Ketua MUI dan lain-lainnya (15 November 1993) bahwa SDSB akan dicabut kepastiannya menunggu pada tanggal 25 November 1993 di DPR R I.<sup>53</sup>

Dari rapat kerja komisi VII DPR dengan menteri sosial ( 25/11 ) 93 dalam rapat kerja yang dipadati ratusan wartawan dalam dan luar negeri, DPR menyimpulkan bahwa keputusan menteri sosial No BBS 30 - 9 /93 tertanggal 4 September 1993 yang memberikan izin berlakunya SDSB dalam tahun 1994 dicabut dan dibatalkan.

Setelah berhasil dalam menggolkan penghapusan SDSB para aktifis parlemen jalanan itu menyambutnya dengan lega bahkan pekikan Allahu Akbar dan sujud syukur sekitar 700 mahasiswa pengunjung rasa yang datang dari berbagai kota cukup mewarnai suasana di gedung DPR R I.<sup>54</sup>

#### 8. Pencabutan Larangan Jilbab.

Lahirnya surat keputusan no 100/C/Kep/D/1991 merupakan penyempurnaan dari SK lama No 052/C/Kep/D/1982. Proses yang memerlukan waktu tak kurang dari 2 tahun itu dilakukan oleh Direktorat jendral Pendidikan Dasar dan Menengah yang menganalisis "peraturan seragam sekolah" dan menyusun konsep penyempurnaan terhadap peraturan tersebut.

---

<sup>53</sup> *Panji Masyarakat* No 774 THN XXXV, 6 Jumadil Akhir 21-30 November 1993, hlm 28.

<sup>54</sup> *Panji Masyarakat* No 775 THN XXXV, 17-18 Jumadil Akhir, 10 Desember 1993, hlm 15.

Kelahiran SK itu bukan keputusan sepihak melainkan melalui berbagai konsultasi berbagai pihak seperti Alim Ulama, media massa, masyarakat, Bakin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan juga Kejaksaan Agung.<sup>55</sup>

Pada tanggal 16 Februari 1991 secara simbolik Mendikbud memberlakukan SK baru yang ditandatangani oleh Dirjen DikNasMen Prof. Dr.Hasan Walinono dan ketua MUI pusat K.H Hasan Basri. Keputusan itu sungguh melegakan karena mengakhiri pelarangan mengenakan pakaian muslim ( Jilbab ) yang selama ini diberlakukan di SLTP SLTA negeri dan telah memakan korban sejumlah siswi di berbagai kota.<sup>56</sup> Sedangkan siswi yang terlanjur dikeluarkan akan ditangani kasus perkasus.<sup>57</sup>

Meski secara formal pemberlakuannya di mulai tahun ajaran 1991-1992 namun kegembiraan dan rasa syukur oleh para siswi muslim tak bisa dibendung, tidak hanya itu sambutan positif juga datang dari pengurus OSIS, para orang tua dan kaum muslimin di Indonesia bahkan ada yang sujud syukur seperti yang dilakukan beberapa siswi di Bandung dan Jakarta.

---

<sup>55</sup> *Panji Masyarakat*, No. 676, 14-24 Sya'ban 1411 H, 1-11 Maret 1991, hlm. 28.

<sup>56</sup> *Suara Muhammadiyah*, No. 06/76/1991, 16-31 Maret 1991, hlm. 8.

<sup>57</sup> *Tempo*, 2 Maret 1991, hlm 100.

## **BAB IV**

### **REAKSI UMAT ISLAM TERHADAP POLITIK SOEHARTO**

#### **A. Reaksi Orsospol dan Ormas Islam Terhadap Penerapan Azas Tunggal Pancasila**

Semenjak disodorkannya konsep azas tunggal bagi orsospol dan ormas yang ada di Indonesia oleh pemerintah. Sejak sosialisasi ide azas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket Undang-undang politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam beraneka ragam.

Gagasan azas tunggal ini menimbulkan pro dan kontra selama tiga tahun sampai diundangkannya dalam UU No. 5/1985 dan UU No. 8/1985. Pendaftaran kembali ormas-ormas yang harus sesuai dengan UU No. 8/1985 diberi batas terakhir tanggal 17 Juli 1987. ormas yang tidak menerima azas tunggal tidak akan didaftarkan, dengan konsekuensinya dibubarkan.

Bagi kalangan Islam gagasan azas tunggal menimbulkan masalah bukan karena menolak Pancasila dan UUD '45. Akan tetapi karena khawatir dengan menghapuskan azas ciri-ciri Islam, Pancasila akan menjadi agama baru dan kekhawatiran "semangat ke-Islaman" yang menjadi "roh" organisasi menjadi mati.

Secara umum, reaksi kalangan Islam ada tiga macam, yakni :

1. Menerima tanpa reserve : yang masuk dalam golongan ini adalah PPP, NU, PERSIS dan disusul organisasi Islam yang lebih kecil seperti Dewan Masjid Indonesia.



2. Menerima karena terpaksa sambil menanti keluarnya UU keormasan, diantaranya : Muhamadiyah dan Himpunan Mahasiswa Islam.
3. Menolak sama sekali, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII) serta tokoh-tokoh Islam seperti Deliar Noer, Syafrudin Prawiranegara, Yusuf Abdulah serta mubaligh-mubaligh yang secara terbuka melalui pengajian menolak azas tunggal yang puncaknya adalah “Peristiwa Tanjung Priok”.<sup>1</sup>

### **1. Partai Persatuan Pembangunan**

Dengan mencermati dialektika histories PPP nampak sekali pergumulan identitas yang dialami. Sejak didirikan antara tahun 1973-1983, PPP secara jelas mengatasnamakan sebagai partai yang berasaskan Islam. Hal ini dibuktikan dengan perjuangan PPP dalam menggolkan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib disemua tingkat pendidikan. Pada tahun 1973 PPP berhasil memperjuangkan undang- undang perkawinan yang mencerminkan legalitas Islam.

Beberapa waktu kemudian PPP harus merekonstruksi dasar ideologinya, setelah Azas Tunggal mulai diberlakukan secara sistematis dan sistemik. Perubahan dasar ideologi dari Islam diganti azas Pancasila, kemudian disusul dengan langkah “*desakralisasi*” lainnya berupa pergantian lambang partai dari ka’bah menjadi Bintang. Perubahan diatas membawa PPP mengalami pergeseran idantitas ke-Islaman yang tercantum dalam anggaran dasar partai.

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan negara dalam politik orde baru*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 262-266.

Perubahan ini membawa dampak yang besar terhadap perilaku politik para pendukungnya terutama dari pendukung tradisional. Dukungan politik yang sebelumnya bersifat *centripetal*, karena secara keagamaan disatukan dengan sistem makna ( meaning system ) yang sama, menjadi *centrifugal*, terlebih setelah partai – partai lain secara artikulatif dapat menampung aspirasi politik para pendukung PPP.<sup>2</sup>

## 2. NU.

Muktamar Nahdotul ulama ke-27 disitubondo pada tahun 1984, telah membuat keputusan yang fundamental yaitu yang menyangkut azas organisasi dan eksistensi NKRI menurut syar'i. Ketika pemerintah Orde Baru berkeinginan agar Pancasila menjadi satu-satunya azas bagi organisasi sosial dan politik, maka Nahdatul Ulama memberikan dukungan penuh. Pemberlakuan azas tunggal bermula dari adanya konsep massa mengambang (*floating mass*), dimana organisasi tersebut diharapkan lebih berorientasi pada program, tidak terkotak-kotak dalam berbagai ideologi.

Realisasi dari dukungan ini adalah pada muktamar ke-27 di Situbondo, yang memutuskan NU berazaskan Pancasila. Dalam soal Aqidah disebutkan juga bahwa NU sebagai Jamiah Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham Alus Sunnah Waljamaah mengikuti salah satu dari empat madzab yaitu: Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali.

---

<sup>2</sup> Tabrani dan Samsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya Dan Politik, Refleksi Theologi Untuk Aksi Dalam Keberagaman Dan Pendidikan*, (Yogyakarta : Sipes, 1994), hlm. 64.

Konsekwensi dari diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi, dan bentuk negara RI sebagai bentuk yang final dan sah menurut hukum agama, maka persoalan negara yang fundamental dianggap telah terpecahkan.<sup>3</sup>

### 3. Muhammadiyah.

Gagasan pemerintah untuk menerapkan azas tunggal ditanggapi Muhammadiyah pada sidang Majelis Tanwir (forum tertinggi setelah muktamar), pada bulan Mei 1983 yang menghasilkan keputusan<sup>4</sup>

Pertama : Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam AD/ART-nya tanpa mengubah keberadaan Pancasila..

Kedua : Karena persoalan Pancasila sebagai azas tunggal merupakan masalah nasional bagi muktamar, maka harus dihadapi oleh pengurus pusatnya dalam skala nasional. Karenanya pengurus ditingkat regional dan dibawahnya tidak dibolehkan mengeluarkan berbagai pendapat atau berbagai sikap yang terkait dengan masalah ini.

Ketiga : Pembahasan masalah ini akan dilakukan dalam muktamar ke-41 yang akan datang.<sup>5</sup>

Perhatian Muhammadiyah dalam masalah ini mendorong K.H A.R. Faqrudin (ketua umumnya) untuk berkonsultasi dengan Presiden Soeharto. Pada tanggal 2

---

<sup>3</sup> M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraan*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), hlm. 114-117.

<sup>4</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999), hlm. 245.

<sup>5</sup> Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Azas Tunggal Pancasila*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986), hlm. 38.

September 1983, Presiden Soeharto menyarankan agar Muhammadiyah menunggu sampai pembahasan UU keormasan diumumkan.

Sambil menunggu dikeluarkannya UU keormasan, Muhammadiyah menangguhkan Muktamar ke- 41 yang rencananya berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah bulan Februari 1984. Muhammadiyah menyelenggarakan Muktamar di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985.

Baru pada Muktamar di Surakarta, Muhammadiyah secara resmi menerima Pancasila sebagai azas organisasi. Sebelumnya muncul pamflet-pamflet yang berisi keberatan atas penerapan Pancasila sebagai azas tunggal, karena merupakan ancaman terhadap Islam. Penerimaan Pancasila ada yang menggambarkan sebagai “Bunuh diri politik.”<sup>6</sup>

#### **4. HMI.**

Dalam merespon Pancasila sebagai azas tunggal untuk seluruh ormas, HMI mengadakan pembahasan pada kongres ke-15 di Medan Sumatera Utara pada akhir Mei 1983. Melalui menteri pemuda dan olah raga Abdul Ghafur (mantan ketua HMI cabang Jakarta), pemerintah menekan HMI untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal, meskipun UU tentang keormasan baru dipersiapkan dan dalam proses diajukan pemerintah. Dalam pandangan Abdul Ghafur penerimaan Pancasila tidak akan menghilangkan identitas gerakan HMI.

Akhirnya peserta kongres terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menerima Pancasila sebagai azas tunggal, sedangkan kelompok kedua ingin

---

<sup>6</sup> Faisal Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 245.

menunda keputusan sampai UU tersebut diumumkan. karena dominannya kelompok kedua maka keputusan ini menjadi pegangan HMI mengenai azas tunggal. Suatu keputusan yang mengecewakan pemerintah. Satu tahun setelah kongres di Medan PB HMI mengeluarkan *Booklet* yang berjudul "*Pandangan kritis terhadap RUU keormasan.*" HMI berpandangan bahwa UU tersebut mempunyai dampak negatif bagi ormas pada umumnya dan ormas Islam pada khususnya. Karena menurut HMI UU tersebut merupakan bagian dari rekayasa politik pemerintah untuk memapankan sistim "*monolitik.*"

Pada pertemuan tanggal 1-7 April 1985 di Ciloto Jakarta PB HMI membatalkan pernyataan tersebut dan mengeluarkan pernyataan baru, bahwa HMI menerima pancasila sebagai azas tunggal organisasi. Keputusan ini kemudian diratifikasi oleh HMI dalam kongres ke-16 di Padang Sumatera Barat tahun 1986.

Keputusan ini mendapat tantangan dari berbagai cabang yang akhirnya membentuk organisasi tandingan dengan nama MPO (Majlis Penyelamat Organisasi ) yang dipimpin oleh Eggie Sudjana.<sup>7</sup>

## **5. PII.**

Pelajar Islam Indonesia didirikan pada tanggal 4 Mei 1947 di Yogyakarta. Organisasi ini menempuh jalan yang berbeda dalam merespon Pancasila. Sebagai organisasi bagi pelajar tingkat atas PII tetap mempertahankan Islam sebagai azas organisasi dan dengan gigih menolak Pancasila sebagai azas organisasi. Akibat sikap

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.253-256

Yang berseberangan dengan pemerintah, melalui menteri dalam negeri pemerintah mengeluarkan keputusan No. 120 tanggal 10 Desember 1987 melarang PII dengan alasan PII tidak mengikuti prinsip-prinsip fundamental UU keormasan<sup>8</sup>.

Ketua umum PII Mutaminul Ula mempertanyakan posisi organisasinya dengan mengatakan bahwa secara hukum PII berkewajiban menggunakan Islam sebagai azas organisasinya, untuk membedakan dengan yang lain.

Dengan dilarangnya PII, dapat dikatakan bahwa umat Islam khususnya kelompok modernis telah kehilangan aset nasionalnya yang melatih generasi muda muslim menjadi pemimpin yang tangguh<sup>9</sup>.

## **B. Reorientasi Startegi Politik Elit Islam**

Dinamika Umat Islam dalam hubungannya dengan pemerintah pada awal Orde Baru diwarnai dengan ketegangan dan konfrontasi sehingga menempatkan kaum muslimin pada posisi marjinal dibanding dengan kelompok lain yang lebih sedikit kuantitasnya.

Hasil yang diperoleh tidak sepadan dengan energi yang dikeluarkan. Dengan mengedepankan partai Islam dan oposisi ternyata menempatkan umat Islam pada posisi pinggiran. Indikasi riilnya dapat dilihat dari tidak adanya jabatan strategis negara yang dipegang oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang gerakan Islam.

---

<sup>8</sup> *Tempo*, 6 Februari 1988, hlm. 24.

<sup>9</sup> Faisal Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 258

Kenyataan ini membawa beban psikologis karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

Kenyataan politik umat Islam merupakan permasalahan yang mesti dipecahkan oleh intelektual Islam yang mulai mengeliat pada awal dekade 1970-an. Persoalan itu antara lain : Pertama, mengapa umat Islam dipojokkan sebagai golongan anti Pancasila padahal sila-silanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan para pemimpin Islam ikut dalam merumuskan sebagaimana dalam muqoddimah UUD'45. Kedua orang-orang Islam tidak bisa serta dalam memimpin negara dan duduk dalam pemerintahan seperti yang terjadi pada satu dasawarsa sesudah 1945. Ketiga bagaimana sikap kaum muslimin terhadap arus modernisasi yang menjadi landasan kebijakan orde baru, apakah umat Islam dapat ikut serta dalam program pembangunan di Indonesia yang didukung oleh negara-negara barat

Pertanyaan di atas memunculkan introspeksi di kalangan intelektual muslim terhadap perjalanan yang telah dilalui umat Islam. Kebanyakan intelektual muda berpandangan suatu gerak perubahan perlu segera dilakukan untuk menjawab problematika yang menyelimuti umat Islam.<sup>10</sup>

Pandangan ini memunculkan suatu gerakan yang disebut dengan pemikiran baru Islam. Gerakan ini tidak hanya membicarakan posisi umat Islam dalam kancah perpolitikan Orde Baru, tetapi juga membicarakan tentang Tuhan, manusia dan berbagai persoalan kemasyarakatan untuk melakukan terobosan mengembalikan daya

---

<sup>10</sup> Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergolatan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 141-142.

gerak psikologis (*Psychological Striking Force*) umat Islam dalam perkembangan.

Menurut Bahtiar Effendi membawa implikasi :

- a) Memformulasikan dasar-dasar keagamaan / teologis politik.
- b) Mendefinisikan ulang cita-cita politik Islam.
- c) Meninjau kembali strategi politik Islam <sup>11</sup>.

Persoalan ini kemudian dikembangkan dalam suatu pertemuan ilmiah di Cibulan pada bulan Juni 1969 yang merupakan pertemuan kalangan intelektual Islam pertama yang membicarakan persoalan penting nasional menyangkut kesiapan umat Islam Indonesia untuk turut serta dalam proses pembangunan di Indonesia.

Seorang intelektual muslim yang yang pertama kali membahas masalah ini adalah Deliar Noer dalam tulisannya yang berjudul “Umat Islam dan masalah modernisasi” berpendapat bahwa modernisasi tidak berlawanan dengan masalah teologis bahkan sesuai dengan ajaran Islam, selain memunculkan wacana yang baru Deliar Noer juga memberikan terapi penyelesaian, adalah menghilangkan persoalan intern seperti taqlid terhadap pikiran – pikiran lama, keterkaitan terhadap kehidupan sufisme yang berlebihan artinya persoalan tradisionalisme Islam yang dianggap menjadi penghalang kemajuan, terutama dalam bidang berfikir.<sup>12</sup> Langkah berikutnya mengajak umat Islam untuk bersikap positif dalam memandang ide modernisasi, jika umat Islam benar- benar berpandangan, Islam sesuai dengan segala zaman.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 143

<sup>12</sup> Al-Chaedar, *Reformasi Prematur, (Jawaban Islam terhadap Reformasi Total)*, (Jakarta : Darul Falah Penerbit Buku Islam, 1999), hlm. 151.



Apa yang dikatakan Deliar Noer merupakan ajakan untuk melihat persoalan modernisasi tidak secara emosional melainkan secara kritis dengan menunjuk seluruh komponen modernisasi ke dalam pikiran modern yang sesuai dengan ajaran Islam, selain itu Deliar Noer juga memberikan himbauan kepada pemerintah Orde Baru bahwa modernisasi tidak hanya mencakup persoalan pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan persoalan demokrasi dan keadilan.

Respon kritis juga disuarakan oleh Umar Hasham yang melihat secara utuh masalah modernisasi. Menurutnya selain mempunyai potensi untuk dimasuki budaya Barat dalam taraf-taraf tertentu yang dapat memunculkan kecenderungan sikap hidup yang hedonistic yang bertentangan dengan Islam, tetapi dalam modernisasi ada nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti anjuran semangat untuk maju dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sementara ini Noerkholis Madjid yang memimpin organisasi mahasiswa Islam (HMI) terbesar di Indonesia, memahami bahwa modernisasi identic dengan rasionalistik, sehingga terkandung pola menghilangkan pola berfikir yang tidak rasionalistik, untuk memperoleh hasil yang maksimal dan efisien sebuah pekerjaan. Proses demikian didapat berdasarkan penerapan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang mutakhir. karena ilmu pengetahuan merupakan hasil sebuah pemahaman manusia atas hukum obyektif yang mengatur alam semesta, penerapannya pun bersifat rasional, hal itulah yang disebut modern.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 152

Noerkholis seorang muslim yang dididik dalam pondok pesantren modern Gontor, yang memadukan ilmu- ilmu Islam tradisional dengan ilmu modern,yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Semasa kuliah di IAIN Noerkholis Madjid aktif dalam organisasi ( PII dan HMI )<sup>14</sup>

Modernisasi dalam pengertian demikian berarti bekerja dan berfikir menurut aturan hukum alam. Menjadi modern berarti mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah, bersikap dinamis dan progresif dalam mendekati kebenaran yang universal.<sup>15</sup>

Noerkholis Madjid telah menghitung segala resiko dari gerakan pembaruan yang hendak dilakukan. Gagasan “Pemikiran Baru” Islam menemukan bentuknya ketika Noerkolis menuangkan pemikirannya dalam makalah yang berjudul “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” yang dibacakan pada awal 1970-an, pada acara silaturahmi HMI,GPI, PII, dan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia.

Pandangan Noerkholis yang mengesankan seorang sekularistic memancing kontroversi karena menentang arus utama yang menyemangati persatuan yang banyak disuarakan seluruh pemimpin Islam. Antara lain melalui konggres umat Islam Indonesia Indonesia yang digagalkan rezim Orde Baru.

Poin penting yang berkaitan dengan persoalan politik dalam Islam dari makalah Noerkholis Madjid, yang disampaikan diJakarta adalah refleksi kritisnya

---

<sup>14</sup> Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, hlm. 331.

<sup>15</sup> Al-Chaidar, *Op.Cit.*, hlm. 153.

terhadap Partai Islam. Dalam kesempatan lain Noerkolis juga menyarankan agar segera diakhirinya kecenderungan ideologi partai-partai politik dan jangan tenggelam dalam pola lama, yang cenderung mensakralkan institusi-institusi yang bersifat profan, seperti partai Islam, Idiologi Islam, dan gagasan negara Islam. Dalam kerangka berfikir Noerkholis yang absolut hanyalah Allah semata.

Dalam bingkai premis tersebut kemudian dia menyerukan Islam Yes, Partai Islam No. Sebuah jargon yang mendorong umat Islam agar mengarahkan komitmennya pada nilai-nilai Islam, bukan pada Institusi, meskipun mengatasnamakan Islam.<sup>16</sup> Penolakan Noerkholis bukan pada Islamnya melainkan pada pengikatan mutlak yang memakai institusi Islam.

Rasa tak percaya pada efektifitas perjuangan politik umat melalui partai Islam merupakan gejala general dikalangan gerakan pemikiran baru. Endang Syaifuddin Anshori, intelektual yang dekat dengan tokoh Masyumi, yang dalam banyak hal bertentangan dengan Noerkholis juga menyetujui pandangan tersebut.

Amin Rais tokoh intelektual yang berpengaruh luas dalam organisasi Muhammadiyah juga mengamini pandangan ini. Dalam pernyataan lebih eksplisit yang mengekspresikan pandangan skeptis terhadap Partai Islam juga ditemukan dalam berbagai tulisan. Dalam kalkulasinya, andaikata pemilu benar-benar luberpun Partai Islam tidak akan dapat suara mayoritas.

Pandangan yang hampir sama, meskipun tidak langsung dinyatakan, disuarakan Abdurrahman Wakhid (tokoh sentra pembaharu di tubuh NU ). Dari

---

<sup>16</sup> Aminuddin, *Op.Cit.*, hlm. 145-146.

pandangannya dapat ditangkap adanya semangat untuk tidak memandang Partai Islam sebagai instrumen politik yang segala-galanya bagi umat Islam. Kalaupun melalui jalur partai Islam, seperti PPP, itu bukan satu-satunya bagi artikulasi politik kaum muslimin.<sup>17</sup>

Baik Noerkholis maupun Abdurramman Wakhid sama-sama menyadari perlunya umat Islam mengembangkan perubahan keadaan secara gradual dan berusaha menghindari sikap resistensi dengan berposisi atau berkonfrontasi terus-menerus, karena hanya akan membawa kerugian bagi umat Islam sendiri.

### **C. Dukungan Terhadap Kepemimpinan Soeharto.**

Saat Presiden Soeharto berulang tahun ke-74. 8 Juni 1995, Andi Mappetahang Fatwa (A.M. Fatwa) anggota pokja petisi 50, mengirim ucapan selamat ulang tahun lewat telegram ke kediaman Presiden Jl. Cendana No. 8 "Izinkan saya sekeluarga dan rekan-rekan sefaham, menyertai rasa syukur dan kebahagiaan pak Harto sekeluarga atas rahmat dan karunia Allah dengan usia 74 tahun dalam sehat wal afiat lahir dan batin," Begitu bunyi A.M. Fatwa yang ditembuskan ke media massa.

A.M. Fatwa adalah narapidana politik yang dihukum 18 tahun penjara oleh pemerintah Orde Baru. Sebagai seorang Muslim A.M. Fatwa mempunyai analisis lain tentang perubahan yang terjadi pada Soeharto. Usia dan pengalamannya akan membawa pada kearifan. Walaupun mendapat kritikan dan pujian A.M. Fatwa seakan mengetahui bagaimana menyikapi situasi yang kondusif ini. Fatwa menunjuk

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 146-147.

momentum penting dalam perjalanan Ibadah Haji Soeharto pada tahun 1991. Menurutnya Ibadah Haji bukan peristiwa biasa, karena betapapun juga Soeharto adalah kepala negara di sebuah negara muslim. Fatwa menunjuk perubahan perilaku Ali Sadikin sesudah berhaji pada tahun 1974.

Selain A.M. Fatwa banyak tokoh-tokoh Islam yang menangkap adanya perubahan positif Soeharto dengan antusias. Ketua umum Majelis Da'wah Islamiyah (MDI), Cholid Mawardi lebih jauh mengusulkan agar Soeharto diakui sebagai pemimpin tertinggi umat Islam Indonesia (Amirul Muslimin al-Indonesia).<sup>18</sup> Dukungan terhadap Soeharto juga ditunjukkan oleh Almsyah Ratu Prawiranegara (Alamsyah mantan menteri Agama dan menko kesra). Pada tanggal 30 September 1998 bersama 21 tokoh Islam lewat naskah kebulatan tekad mendukung Soeharto untuk dicalonkan menjadi Presiden.

Budaya kebulatan tekad mulai lahir sejak usai kejadian Malari 1974. Gagasan ini mulai mengisi blantika politik nasional Indonesia. Pelopornya kala itu adalah Ali Murtopo dan Soejono Humardani, yang keduanya adalah asisten (aspri) Soeharto. Pada tahun 1978 menjelang pemilu, kebulatan tekad sudah bergulir dalam ritme kehidupan politik Indonesia. Ada anggapan bahwa giatnya Menpen Ali Moertopo yang diikuti tokoh-tokoh lain seperti Abdul Ghafur, Moerdopo, dan Cosmas Batubara, yang berdendang tentang Soeharto adalah Bapak Pembangunan karena

---

<sup>18</sup> Adian Husaini, *Soeharto 1998*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 25,35-36.

Saat menerima pimpinan pondok pesantren Suryalaya Jawa Barat, 13 Juni 1995, Presiden Soeharto menerima do'a dari K.H. Shohibul Wafa Abdul Arifin (Abah Anom). Abah Anom juga menyampaikan undangan kepada Presiden Soeharto untuk menghadiri peringatan Ulang Tahun ke-90 Pondok Pesantren ( PP ) Suryalaya, tanggal 5 September 1995. Akhirnya Presiden memenuhi undangan tersebut.

Kata Abah Anom keluarga besar PP Suryalaya menghaturkan ucapan selamat sejahtera kepada Presiden atas usianya yang ke-74, "Semoga diberi panjang umur dalam memimpin bangsa Indonesia mencapai keberhasilan yang gemilang, sejahtera lahir batin dunia akhirat, serta terus berkesinambungan dalam pembangunan dibawah pimpinan Bapak, semoga selalu memperoleh taufik dan hidayah Allah." Setelah menerima ucapan dan do'a dari Abah Anom, Presiden dan para pimpinan pondok pesantren berdo'a, dan membaca surat Al- Fatihah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 41-42.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Perilaku politik Soeharto dalam hal ini kaitannya dengan hubungan antara Soeharto dengan umat Islam selama Soeharto berkuasa dapat di polarisasikan ke dalam 3 masa :

1.) Hubungan Antagonistik ( 1966-1981 )

Pada masa ini setelah Soeharto memantapkan kekuasaannya segera melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kekuatan politik Islam. Hal ini sebagai akibat trauma masa lalu pembangkangan tokoh-tokoh Islam, diantaranya penolakan pembentukan PDII, dan rehabilitasi Masyumi disahkannya aliran kepercayaan dalam Sidang Umum MPR 1973 kedalam GBHN, rancangan UU perkawinan yang merugikan umat Islam, serta penarikan dan pelegalan perjudian.

2.) Hubungan Resiprokat Kritis

Pada masa ini pemerintah melakukan *political test* dengan menyodorkan konsep azas tunggal. Walaupun menimbulkan pro dan kontra serta perpecahan umat Islam tapi setelah dapat diyakinkan oleh Menteri Agama serta Soeharto serta tokoh-tokoh Islam yang ada di birokrasi akhirnya sebagian besar orsospol dan ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas. Setelah melalui *political test* umat Islam dinilai telah lulus ujian serta umat

Islam menyadari bahwa pemerintah tidak akan menjauhkan umat Islam dengan agamanya.

### 3.) Hubungan Akomodatif ( 1985-1990 )

Pada masa ini kebijakan pemerintah banyak yang menguntungkan umat Islam diantaranya RUU Pendidikan Nasional, RUU Peradilan Agama, kasus Monitor penghapusan larangan Jilbab, berdirinya BMI dan ICMI.

Berbagai kebijakan yang timbul selain di tangan Saharto pembantunya juga mempunyai andil yang cukup besar diantaranya CSIS yang diyakini sebagai dapur pemikiran dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam. Reaksi umat Islam beragam sesuai dengan situasi yang ada dalam kebijakan pemerintah.

- (1) Kelompok yang berpandangan pragmatis dengan meninggalkan label dan ideologinya dalam pemikiran dan politisnya.
- (2) Kelompok akomodatif, pemikiran dan sikap politiknya lebih kompromis terhadap pemerintah.
- (3) Kelompok transformatif yang memiliki komitmen terhadap terhadap perubahan yang mendasar tetapi menolak dengan cara-cara radikal dan revolusioner
- (4) .Kelompok prinsipatis yang menghendaki ditegakkannya prinsip-prinsip dasar yang diyakini yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya.



Perubahan politik Soeharto terhadap umat Islam dipengaruhi oleh pandangan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan serta pencarian dukungan politik untuk keseimbangan kekuatan setelah renggangnya hubungan Soeharto dengan ABRI.

Secara umum reaksi orsospol dan ormas Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Menerima tanpa *reserve* diantar PPP, NU, Perti.
2. Menerima karena terpaksa sambil menunggu keluarnya UU keormasan yang baru di golongan ini antara lain Muhammadiyah dan HMI.
3. Kelompok yang menolak sama sekali yaitu PII.

## **B. SARAN**

Penelitian mengenai hubungan umat Islam dengan pemerintah (orde baru ) cukup menarik, khususnya perilaku Soeharto sebagai pengendali orde baru. Perjuangan umat Islam pada masa Orde Baru mengalami pasang surut, terkadang dipinggirkan, terkadang di *Anak Emaskan*. terlebih umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, tetapi pengaruhnya tidak sebanding dengan moyoritas. Dari hubungan antara umat Islam dengan pemerintah baik yang bersifat Antagonistik maupun Akomodatif, penulis mengharapkan penelitian lebih lanjut, karena banyak kebijakan yang belum terungkap. Mengenai hubungan yang bersifat Resiprokat banyak sebab musabab yang belum terungkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurracman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : PT. Lagas Wacana, 1999.
- Abrur, Muhammad. *ICMI Dan Harapan Umat*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhana, 1991.
- Al-Chaedar. *Reformasi Prematur (Jawaban Islam terhadap Reformasi Total)*, Jakarta : Darul Fallah , 1999.
- Ali, Fachri & Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Amin, M. Masyhur. *NU & Ijtihad Politik Kenegaraan*, Yogyakarta : Al Amin Press, 1996.
- Aminuddin. *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ariffin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Culla, Adi Suryadi. *Patah Tumbuh Hilang Berganti, (Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik Dan Sejarah Indonesia), 1908-1998*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dwipayana Dan Ramadhan K H, Soeharto : *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, Jakarta: Pt Citra Lamtorogung Persada, 1989.
- Fatah, Eep Saefolloh. *Bangsa Saya Yang Menyebalkan*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1998.
- Feillard, Andree. *NU Vis-À-Vis Negara*, Yogyakarta : LKIS, 1999.
- Firdaus, An. *Dosa-Dosa Politik Orde Lama Dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Terulang Lagi Di Era Reformasi*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Haris, Samsudin. *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Meedia Sarana Indonesia, 1991.

- Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa*, Jakarta : Gema Insani Press 1997.
- Harun, Lukman. *Muhammadiyah dan Azas Tunggal Pancasila*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1986.
- Husaini, Adian. *Soeharto, 1998*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni Dan Otoritas Agama*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999:
- Julius. Purn. *Beni Murdani : Profil Prajurit Dan Kenegaraan*, Jakarta : Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, 1991.
- Karim, M. Rusli. *Dinamika Umat Islam Indonesia (Suatu Tinjauan Sosial Politik)*, Yogyakarta : PT. Hanindifa Offset, 1985.
- . *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Kuntowijoyo. *Dinamika Umat Islam Indonesia*, Yogyakarta : Shalasudin Press Dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Luth, Thohir. *M. Natsir : Dakwah Dan Pemikirannya*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1990.
- . *Islam dan Politik (Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959 – 1965)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1990.
- Makka, Makmur. *B J Habibie, Kisah Hidup Dan Kariernya*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Mudzakar, Abdul Khahar. *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, Jakarta : Darul Fallah, 1999.
- Ndraha, Taliziduhu. *Disain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Noer, Deliar. *Muhammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- . *Pengantar Kepemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali 1983.

- Pusat Study Dan Informasi. *Tanjung Priok Berdarah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Rais, M. Amin. *Cakrawala Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Bandung : Mizan (Anggota IKAPI), 1987.
- Rickers, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta Gajah Mada University Press 1991.
- Roeder, O G. *Anak Desa ( Biografi Presiden Soeharto )*, Jakarta : PT Gunung Agung, 1976.
- Somega, Indria. *Demitologisasi Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998.
- Subagio, Rahmat. *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan, Dan Agama*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1976
- Susanto, Nugroho Noto (Terj). *Mengerti Sejarah*, Jakarta : UI Press, 1975.
- Suryadinata, Leo. *Golkar Militer Study Tentang Budaya Politik*, Jakarta : LP3ES, 1992.
- Tabrani, & Samsul Ariffin. *Islam Pluralisme Budaya Dan Politik Reflek Teologi Untuk Aksi Dalam Keberagaman Dan Pendidikan*, Yogyakarta : Sipress, 1994.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Qodir, Zuli. Dan Lalu M Iqbal Songell. *ICMI, Negara Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Studi Lingkar Dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, Jakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1994
- Uhlen, Anders. *Oposisi Berserak*, Bandung : Mizan, 1998
- Yayasan Penyelenggara Perterjemah/Penafsir Al-Qur'an. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Komplek Percetakan Al Qur'an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd, 1411 H / 1990 M.

## **Kamus**

Kridalaksana, Hari Murti. *Kamus Linguistik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Poerwadarminta, B. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1976.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 1988.

## **Artikel**

Azra, Azyumardi. *ICMI : Dari Siracuse Ke Brain Trust*, Berita Buana, 7 Desember 1990.

Harun, Lukman. *Tantangan Pembangunan Bidang Keagamaan*, Surabaya : Gema Clipping Service, 1990.

Hassan, Fuad. *Depdibud Sadari Tanggungjawab Laksanakan Pembangunan Pendidikan*, Suara Merdeka, 3 Mei 1991.

Lelana, Tan. *Perombakan PP Partai Muslimin*, Suara Muhammadiyah No 17-18 Th - 50, 1970.

Mahfud, A Halim. *Dinamika Dan gejala Konsolidasi Umat*, Wartawan Surya, Clipping Service, 1990.

## **Majalah**

*Editor* : No 37 /Thn III/26 Mei 1990, No 28 /Thn I/5 Maret 1988, No 28/Thn II/11 Maret 1989, No 7/Thn IV/27 Oktober 1990, No 8/Thn IV /3 November 1990, No 9 /Thn VII/25 Desember 1993.

*Jawa Post* : 7 November 1991

*Kompas* : 6 Desember 1990.

*Panji Masyarakat* : No 163 Thn XVI 1 Maret 1974, No 676 Thn XXXIII 1-11 Maret 1991, No 774 Thn XXXV 21-30 November 1993, No 774 Thn XXXV 1-10 Desember 1993, No 647 Thn XXXI 11-20 Mei 1990.

*Suara Merdeka* : 8 November 1991.

*Suara Muhammadiyah* : No 06/76/6-13 Maret 1991.

*Tempo*, 7 Maret 1973, 13 Agustus 1988, 4 Februari 1989, 24 Juni 1989, 2 Maret 1991, 9 November 1991, 6 Februari 1988.

**LAMP IRAN**

**Beberapa Kasus Hubungan Islam dan Negara  
Dalam Periode Antagonistik (1967-1982)\***

No	Kasus	Tahun	Inisiatif Negara/Islam	Tujuan	Tanggapan Negara/Islam	Materi Konflik	Substansi Konflik	Metode Pemecahan	Hasil
1.	Pembentukan PDII	1966-1967	Umat Islam (Mohd. Hatta bersama tokoh-tokoh muda HMI dan PII)	1. Keinginan Mohd. Hatta untuk menyalurkan aspirasi politiknya 2. Mendidik generasi Muda Islam	1. Tidak memberikan izin karena menilai PDII tidak dapat menampung aspirasi Islam modernis; 2. Tidak dapat menyaingi PNI 3. Pendirian PDII dapat mengganggu stabilitas nasional	Mohd. Hatta tidak bermaksud mendirikan Partai Politik Islam yang berlainan dengan yang pernah ada. Namun, pemerintah Orde Baru baru menganggap bahwa PDII tidak dapat menggantikan Masyumi dalam hal aspirasi politik Islam modernis, sehingga PDII hanya akan menyulitkan pemerintah	Perbedaan penafsiran dalam hal tujuan pendirian PDII dan peranan "Partai Politik Islam" dalam format politik Orde Baru yang akan dibentuk.	Presiden Soeharto menyarankan supaya bung Hatta dkk. Bergabung dalam BKAM yang sedang siap-siap mendirikan partai politik baru	PDII gagal berdiri
2.	Rehabilitasi MASYUMI	1966-1967	Umat Islam (BKAM)	Merchabilitasi Masyumi	Pemerintah Orde Baru tidak mengizinkannya	Mantan tokoh - tokoh Masyumi menganggap bahwa pembubaran Masyumi oleh Bung Karno tidak legal. Tidak ada bukti bahwa Masyumi sebagai organisasi terlibat dalam PRRI.	"Ketakutan" Pemerintah Orde Baru atas kiprah Masyumi pada masa lalu. Pemerintah khawatir akan tercipta ketidakstabilan politik akibat konflik ideologi. Sebaliknya tokoh-tokoh Masyumi ingin berperan kembali.	Pemerintah tidak memberikan izin	Masyumi gagal dirchabilitasi
3.	Eliminasi Mantan Tokoh-tokoh Masyumi dalam Parmusi	1967-1971	Negara	1. Mencegah tampilnya Tokoh-tokoh Masyumi dalam kepengurusan Parmusi 2. Memangkas daftar caleg Parmusi yang memuat nama mereka	Aktivitas BKAM mengambil "jalan tengah" dengan memunculkan tokoh moderat Masyumi, seperti Moh. Room dan memunculkan tokoh baru: Djarnawi dan Lukman Harun	Bagi tokoh-tokoh Islam (BKAM)	Perbedaan penafsiran sila pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.	Pemerintah Orde Baru merckayasa masuknya tokoh-tokoh Islam yang loyal kepada pemerintah. Pertama kali mendorong Naro dan Imron Kadir mengkup kepemimpinan Djarnawi dan Lukman Harun, lalu meng SK-kan Mintaredja untuk memimpin Parmusi	Terjadi konflik internal, yang pada akhirnya berhasil mengeliminir tokoh yang tidak akomodatif dengan pemerintah.
4.	Aliran Kepercayaan	SU MPR 1973	Negara	Memasukkan aliran Kepercayaan dalam GBHN 1973	1. FPP dalam sidang MPR 1973 mempersoalkannya. 2. Dalam masyarakat tokoh-tokoh Islam mengccan rumusan itu			Sidang-sidang dalam MPR	Aliran Kepercayaan tetap dimasukkan dalam GBHN FPP menerimanya dengan catatan



5.	RUU Perkawinan	Sidang DPR 1973	Negara (pemerintah)	Melakukan unifikasi hukum nasional di bidang perkawinan	1. FPP dan DPR berjuang untuk menghapuskan semua pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam 2. Umat Islam memberikan reaksi secara luas, seperti pernyataan ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, dan demonstrasi mahasiswa/pemuda Islam	1. Umat Islam curiga bahwa RUU tersebut disusun oleh "orang-orang Katolik" dengan sasaran Kristonisasi. 2. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintah wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945.	1. Bersifat ideologis, adanya beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam; 2. Umat Islam menganggap bahwa kegiatan perkawinan adalah ibadah, sehingga pemerintah wajib menjamin pelaksanaan ibadah warga negaranya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945.	3. <i>Lobbying</i> antar FPP dengan fraksi-fraksi lainnya yang dinilai dalam DPR dan kalangan pemerintah. 4. <i>Lobbying</i> yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, terutama dengan FABRI dan FKP yang menolak RUU tersebut, dan juga dengan pemerintah, termasuk dengan Presiden Soeharto sendiri.	RUU perkawinan disahkan setelah semua pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam dihapuskan
6.	Masalah Perjudian	Akhir 1960-an awal 1970-an	Negara (pemerintah)	Mengumpulkan pajak dari sarana-sarana perjudian	Umat Islam menolak kebijaksanaan pemerintah yang mengizinkan berdirinya sarana-sarana hiburan dan perjudian.	Perbedaan orientasi antara pemerintah yang bersifat pragmatis (pajak) dengan umat Islam yang berangkat pada norma-norma nilai.	Perjudian dinilai umat Islam bertentangan dengan ajaran Islam.	Tidak ada	Pemerintah sendiri yang secara bertahap mengurangi sarana-sarana hiburan dan perjudian
7.	RUU tentang Papol dan Golkar	1975	Negara (pemerintah)	Menyeragamkan asas parpol dan Golkar	PPP menolak menanggalkan asas cirinya (Islam)	Perbedaan penafsiran mengenai Pancasila dan UUD 1945	Pemerintah yang didukung oleh FKP, FABRI, dan FPDI menganggap bahwa orsospol harus menyeragamkan asasinya (Pancasila). FPP menolaknya karena menilai bahwa asas Islam yang menjadi asas cirinya tidaklah bertentangan dengan Pancasila.	Kompromi diantara anggota-anggota fraksi pemerintah	Asas ciri PPP tetap dipertahankan
8.	Aliran Kepercayaan	SU MPR 1978	Negara	Memasukkan aliran Kepercayaan dalam GBHN 1978	FPP menolaknya	Perbedaan penafsiran sila Pertama dan pasal 29 ayat 2 UUD 1945	FPP menganggap bahwa aliran kepercayaan bukanlah agama, dan karenanya tidak dapat dimasukkan dalam GBHN. Sebaliknya FKP, FABRI, FUD dan FPDI berpendapat sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Aliran Kepercayaan diakui keberadaannya di Indonesia.	FPP melakukan <i>Walk Out</i>	Aliran kepercayaan tetap dimasukkan dalam GBHN 1973
9.	PPPP (P4)	SU MPR 1978	Negara	Menetapkan P4 dalam bentuk Ketetapan MPR	FPP menolaknya	Perbedaan pendapat mengenai kedudukan P4 (UU atau TAP MPR)	FPP berpendapat bahwa P4 sebaliknya dalam bentuk UU saja dikhawatirkan P4 dapat menjadi "tafsir Pancasila"	FPP melakukan <i>Walk Out</i>	P4 ditetapkan menjadi TAP MPR No. II/MPR/1978

\* Dikutip dari Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara (Dalam Politik Orde Baru)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hlm. 305-306.

**Tabel VI. 3**  
**Beberapa Kasus Hubungan Islam dan Negara dalam Periode Akomodatif**  
**( 1985 – 1994 )\*\***

No.	Kasus	Tahun	Inisiatif	Tanggapan negara /umat Islam
1.	Tuntutan penghapusan larangan menggunakan busana muslimah di sekolah-sekolah	1980-an / awal 1990-an.	Umat Islam	Mengakomodasi tuntutan tersebut dan tahun 1991 larangan tersebut dicabut.
2.	RUU Pendidikan Nasional	1988	Negara (pemerintah)	Menimbulkan reaksi penentangan umat Islam. Penentangan ini dapat diselesaikan lewat <i>lobbying</i> yang diadakan oleh tokoh-tokoh Islam. Pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam. Semua pasal yang dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dihapuskan. Demikian pula terhadap pasal-pasal yang merugikan kepentingan lembaga pendidikan Islam.
3.	RUU Peradilan Agama	1988	Negara (pemerintah)	Umat Islam menyambutnya dengan anusias. RUU tersebut dinilai menguntungkan kepentingan umat Islam. Sebaliknya golongan non muslim protes karena RUU PA dipandang sebagai realisasi Piagam Jakarta. Protes-protes ini berhenti dengan sendirinya setelah presiden Soeharto sendiri yang menjamin tidak ada upaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta
4.	Reaksi atas kasus Monitor	1990	Umat Islam	Pemerintah dan ABRI tidak melarang unjuk rasa terhadap tabloid Monitor bersama dengan pemimpin redaksinya Arswendo Atmowiloto. Pemerintah dengan tanggap memenuhi tuntutan tersebut. Deppen mencabut SIUP Monitor. Arswendo dikenai tuduhan melakukan tindak pidana. PWI mencabut keanggotaannya.

5.	Kasus serupa untuk kasus Bosnia-Palestina, SDSB, BPINDO, Pornografi	1990-an	Umat Islam	Pemerintah mengakomodasi tuntutan tersebut.
6.	Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila	1980-an/1990-an	Negara (Presiden Soeharto)	Umat Islam menyambutnya dengan baik. Permintaan bantuan untuk membangun/merahabilitasi masjid datang dari mana-mana.
7.	Pengiriman Seribu Da'i ke daerah terpencil dan daerah transmigrasi	1989/1990	Negara dan Islam (rencana MUI yang pembiayaannya kemudian didukung oleh YAMB dan Yayasan Darmais)	Pemerintah dan umat Islam menyambut baik. Ormas-ormas Islam mendukungnya, demikian pula pejabat-pejabat di daerah.
8.	SKB Mendagri dan Menag tentang pengumpulan zakat	1990-an	Negara (Pemerintah)	Umat Islam menyambut baik, dengan mendukung pelaksanaan pengumpulan zakat tersebut.
9.	Kasus diatas juga untuk peningkatan pelayanan Haji, dan pendirian Bank muamalat Indonesia	1990-an	Negara (Pemerintah)	Umat Islam menyambut baik.
10.	Tayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI	1990-an	Negara (Pemerintah)	Umat Islam menyambut baik.
11.	Pembentukan ICMI	Des 1990	Umat Islam dan kemudian diambil alih oleh negara	Negara dan Umat Islam sebagianbesar mendukungnya. Sebagian kecil lainnya bersikap hati-hati, dan ada pula yang mengkritiknya.
12.	Festival Istiqlal beberapa kegiatan ICMI lainnya : Dompot Dhu'afa dan Seminar Mu'jizat Al-Qur'an	1990-an	Umat Islam (ICMI)	Negara mendukungnya dengan mempercepat proses perijinannya, menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut dan diliput secara luas oleh media pemerintah, TVRI.

13.	Tragedi Nipah	Okt 1993	Negara (Aparat Keamanan yang menembaki rakyat pemilik tanah yang sedang unjuk rasa)	Ulama-ulama, terutama ulama Madura dan NU Jawa Timur, mengecam tindakan aparat Keamanan, diikuti oleh demonstrasi mahasiswa/pemuda Islam se Jatim. Pemerintah dan ABRI menanggapi dengan melakukan pendekatan terhadap para ulama. Beberapa kali pertemuan diadakan. ABRI lalu menarik semua anggota-nya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sementara Gubernur Jatim Basofi Sudirman, kendatipun tetap mempertahankan Bupati Sampang, menyatakan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Berikutnya ditempuh pemecahan yang saling mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
-----	---------------	----------	---	--

## CURIKULUM VITAE

Nama : Nanang Supriyanto

Tempat,tanggal lahir : Klaten,20 Oktober 1977

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Marangan, Jimbung,Kalikotes,Klaten 57451

Pendidikan : SD Jimbung II lulus tahun 1990  
MTsn Mlinjon Iulus tahun 1993  
MAN Karangnom lulus tahun 1996  
IAIN sunan kalijaga yogyakarta jurusan ski masuk  
tahun 1996.

Nama orang tua :

Ayah : Jumoyo

Ibu : Sri Sukamti

Alamat : Marangan,Jimbung,Kalikotes,Klaten 57451